



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
6 DESEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Jawa Barat berjumlah 16 (Enam belas) Orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Saan Mustopa, M.Si (F-P Nasdem).

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	KETUA TIM Wakil Ketua Komisi II/ F-P Nasdem
2.	A-248	Hj. Aidah Muslimah, S.E.	Anggota/ F-PDI P
3.	A-246	Dr. Hj. Rosiyati M.H. Thamrin, S.E., M.M., M.H.	Anggota/ F-PDI P
4.	A-165	H. Yadi Srimulyadi	Anggota/ F-PDI P
5.	A-273	Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.	Anggota/ F-P Golkar

6.	A-075	H. Ahmad Muzani	Anggota/ F-P Gerindra
7.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/ F-P Gerindra
8.	A-390	Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.	Anggota/ F-P. Nasdem
9.	A-394	Kamran Muchtar Podomi, S.T.	Anggota/ F-P. Nasdem
10.	A-056	H. Haruna, M.A., M.B.A.	Anggota/ F-PKB
11.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-P Demokrat
12.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.	Anggota/ F-P Demokrat
13.	A-541	H. Mohammad Muraz, S.H., M.M.	Anggota/ F-P Demokrat
14.	A-428	Teddy Setiadi, S.Sos.	Anggota/ F-PKS
15.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
16.	A-428	Paulus Ubruangge	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
17.	----	Dahliya Bahnan, S.H., M.H.	Kepala Bagian Sekretariat Komisi II
18.	----	Muhdar Yusa, S.Sos.	Sekretariat Komisi II
19.	----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
20.	----	Eko Supriyanto, S.Kom.	Protokol Komisi II
21.	----	Satya Alvino Pinandito, M.A.	Tenaga Ahli Komisi II
22.	----	Abrar Amir, MAP.	Tenaga Ahli Komisi II
23.	----	Moch. Andri Nurdiansyah	Pemberitaan DPR RI
24.	----	Ronni Sundoro	Pengemudi Bus DPR RI

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kabag dan Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, bagian Pemberitaan dan TV Parlemen, serta utusan dari Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu

Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pejabat KPU RI dan Pejabat Bawaslu RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023.

C. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan yang mewakili Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T, beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selain itu juga hadir Pejabat Kemendagri, Pejabat Setneg, Pejabat KPU RI, Pejabat Bawaslu RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya. Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, menyerapan aspirasi dan dialog dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terutama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mitra kerja Komisi II di daerah. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan dalam bidang pengawasan terkait dengan Kesiapan dan Persiapan Pemilu 2024 serta ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi II DPR RI.

Beberapa topik yang menjadi fokus perhatian Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja reses yakni berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, termasuk kendala yang dihadapi dan potensi masalah yang mungkin muncul, diantaranya adalah mengenai DPT, sosialisasi dan koordinasi, khususnya pada tahapan kampanye, keseragaman pemahaman terhadap regulasi yang ada, dukungan pemerintah daerah kepada penyelenggara pemilu, pengadaan dan

penyimpanan logistik pemilu, serta pelibatan masyarakat dalam mendukung tugas-tugas penyelenggara, dan lain sebagainya.

Dalam kunjungan kerja reses ini Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauhmana proses NPHD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu di daerahnya masing-masing.

Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA DI KANTOR GUBERNUR JAWA BARAT

A. Sambutan Pimpinan Komisi II DPR RI

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ini merupakan kegiatan kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, dimana pada kunjungan kerja reses kali ini, Komisi II DPR RI secara khusus menitikberatkan pada evaluasi dan pengawasan terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, dimana salah satu daerah yang menjadi tujuan kunjungan Komisi II DPR RI adalah Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bali.

Terkait dengan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU beserta jajarannya telah melaksanakan beberapa tahapan. Demikian pula Bawaslu dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan tersebut. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan kampanye yang akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 nanti. Apabila kita hitung dari hari ini, maka tersisa kurang lebih 70 hari

bagi kita semua untuk tiba pada tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024.

Pada kunjungan kerja yang dilaksanakan ini, Komisi II DPR RI disamping bertujuan untuk dapat melihat langsung kesiapan penyelenggara pemilu di daerah dalam melaksanakan tahapan pemilu, juga ingin mendapatkan gambaran secara utuh terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu dalam upaya menyukseskan agenda besar nasional ini. Terlebih lagi Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, dimana jumlah DPT Provinsi Jabar untuk Pemilu serentak 2024 adalah sebanyak 35.714.901 pemilih, atau sekitar 17,4% dari total DPT secara keseluruhan yang berjumlah 204.807.222 pemilih.

Provinsi Jawa Barat selalu menjadi salah satu barometer ataupun tolok ukur dalam setiap perhelatan Pemilu di Indonesia. Untuk itu, kesiapan penyelenggara Pemilu di Jawa Barat dalam melaksanakan setiap tahapan menjadi faktor yang paling krusial agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, damai, aman, dan kondusif. Disamping itu, tentu saja dibutuhkan pula dukungan dari Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat) dalam upaya menyukseskan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Komisi II DPR RI melalui kunjungan kerja kali ini berharap dapat memperoleh berbagai informasi maupun masukan terhadap hal-hal yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, termasuk kendala yang dihadapi dan potensi masalah yang mungkin muncul, diantaranya adalah:

- Terkait Daftar Pemilih Tetap;

- Terkait sosialisasi dan koordinasi, khususnya pada tahapan kampanye;
- Terkait keseragaman pemahaman terhadap regulasi yang ada;
- Terkait dukungan pemerintah daerah kepada penyelenggara pemilu;
- Terkait pengadaan dan penyimpanan logistik pemilu;
- Terkait pelibatan masyarakat dalam mendukung tugas-tugas penyelenggara; dsb.

Disamping itu, Komisi II DPR RI secara khusus juga ingin mengetahui sejauhmana proses NPHD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu di daerahnya masing-masing.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami berharap akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Hal-hal lainnya akan disampaikan pula oleh Anggota Komisi II DPR RI pada diskusi nanti.

Untuk mengefektifkan waktu yang ada, saya mempersilahkan para mitra untuk menyampaikan paparannya, dimulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh Pejabat Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya pemaparan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, dan dilanjutkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kami juga nanti akan mempersilahkan unsur dari Forkopimda yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan pandangannya.

B. Paparan Pemerintah Provinsi Jawa Barat



dirdukcapil
Jabar

POINTER PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

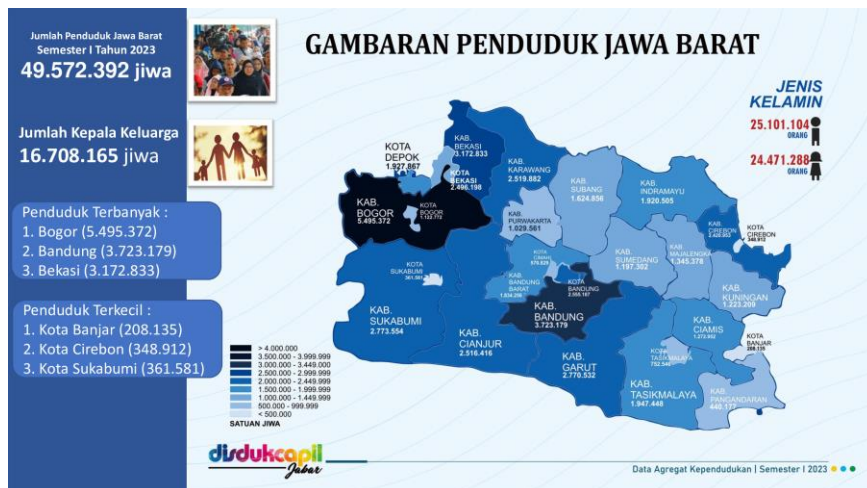
dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII PROVINSI JAWA BARAT



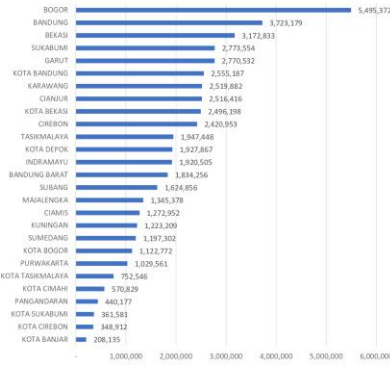

Provincial Government
of West Java

DEMOGRAFI PENDUDUK JAWA BARAT



JUMLAH PENDUDUK JAWA BARAT SEMESTER I TAHUN 2023

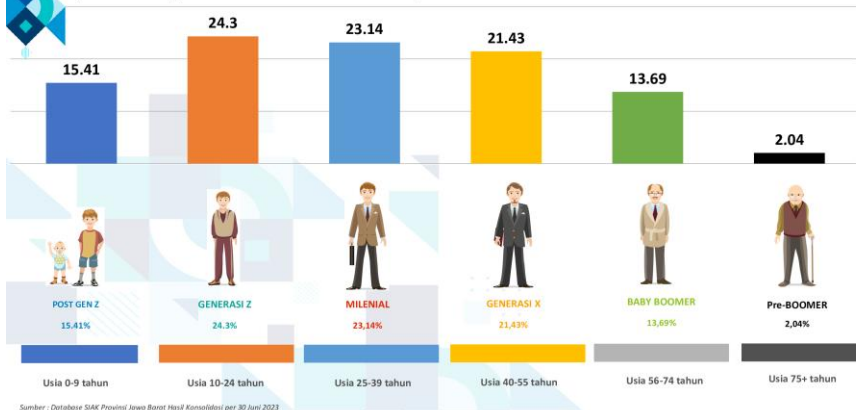


KODE WIL.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N	%	N	%	N	%
3201	BOGOR	2,811,944	5.67	2,683,428	5.41	5,495,372	11.09
3202	SUKABUMI	1,407,945	2.84	1,365,689	2.75	2,773,634	5.59
3203	DANUR	1,296,639	2.60	1,225,777	2.47	2,516,416	5.08
3204	BANDUNG	1,894,120	3.82	1,829,059	3.69	3,723,179	7.51
3205	GARUT	1,413,700	2.85	1,356,832	2.74	2,770,532	5.59
3206	TASIKMALAYA	991,535	2.00	955,913	1.93	1,947,448	3.93
3207	CIAMIS	638,887	1.29	634,065	1.28	1,272,952	2.57
3208	KUNINGAN	628,106	1.25	603,103	1.22	1,231,209	2.47
3209	CIREBON	1,227,690	2.48	1,193,263	2.41	2,420,953	4.88
3210	MAJALENGKA	677,169	1.37	668,209	1.35	1,345,378	2.71
3211	SUMEDANG	603,419	1.22	593,883	1.20	1,197,302	2.42
3212	INDRAMAYU	965,924	1.95	954,581	1.93	1,920,505	3.87
3213	SUBANG	811,870	1.64	812,986	1.64	1,624,856	3.28
3214	PURWAKARTA	521,548	1.05	508,013	1.02	1,029,561	2.08
3215	KARAWANG	1,272,199	2.57	1,247,683	2.52	2,519,882	5.08
3216	BEKASI	1,603,554	3.23	1,509,279	3.17	3,172,833	6.40
3217	BANDUNG BARAT	933,545	1.88	906,711	1.82	1,834,256	3.70
3218	PANGANDARAN	228,575	0.44	219,602	0.44	440,177	0.89
3219	KOTA BOGOR	567,518	1.14	555,254	1.12	1,122,772	2.26
3220	KOTA SUKABUMI	301,582	0.61	291,999	0.59	593,581	1.19
3221	KOTA BANDUNG	1,288,611	2.58	1,274,576	2.57	2,555,187	5.15
3222	KOTA CIREBON	175,005	0.35	173,907	0.35	348,912	0.70
3223	KOTA BEKASI	1,249,193	2.52	1,247,005	2.52	2,496,198	5.04
3224	KOTA DEPOK	967,167	1.95	966,700	1.94	1,927,867	3.89
3225	KOTA CIMAHI	286,742	0.58	294,087	0.57	570,829	1.15
3226	KOTA TASIKMALAYA	382,072	0.77	376,474	0.75	752,546	1.52
3227	KOTA BANJAR	104,845	0.21	103,290	0.21	208,135	0.42
TOTAL		25,101,104	50.64	24,471,288	49.36	49,572,392	100.00

Sumber : Database SIAX Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi per 30 Juni 2023



STRUKTUR UMUR PENDUDUK JAWA BARAT (%) (GENERASI Z TERTINGGI) TAHUN 2023 SEMESTER I



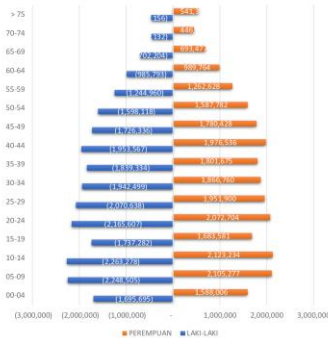
Sumber : Database SIAX Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi per 30 Juni 2023



Jumlah Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Semester I Tahun 2023

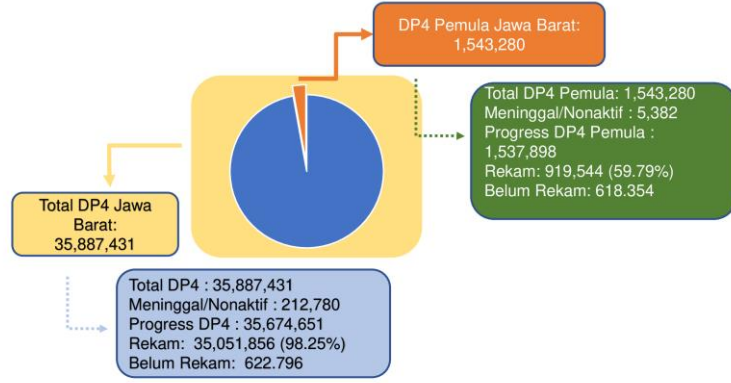


Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	N	%	N	%	N	%
00-04	1,695,695	3.42	1,588,006	3.20	3,283,701	6.62
05-09	2,248,505	4.54	2,105,277	4.25	4,353,782	8.78
10-14	2,263,278	4.57	2,123,234	4.28	4,386,512	8.85
15-19	1,737,282	3.50	1,683,581	3.40	3,420,863	6.90
20-24	2,165,607	4.37	2,072,704	4.18	4,238,311	8.55
25-29	2,070,638	4.18	1,951,900	3.94	4,022,538	8.11
30-34	1,942,499	3.92	1,866,760	3.77	3,809,259	7.68
35-39	1,839,334	3.71	1,801,675	3.63	3,641,009	7.34
40-44	1,953,567	3.94	1,976,536	3.99	3,930,103	7.93
45-49	1,726,336	3.48	1,780,428	3.59	3,506,764	7.07
50-54	1,598,118	3.22	1,587,782	3.20	3,185,900	6.43
55-59	1,244,960	2.51	1,262,628	2.55	2,507,588	5.06
60-64	985,793	1.99	989,764	2.00	1,975,557	3.99
65-69	702,204	1.42	693,477	1.40	1,395,681	2.82
70-74	459,132	0.93	446,224	0.90	905,356	1.83
> 75	468,156	0.94	541,312	1.09	1,009,468	2.04
Total	25,101,104	50.64	24,471,288	49.36	49,572,392	100.00



Sumber : Database SIAX Provinsi Jawa Barat Hasil Konsolidasi per 30 Juni 2023, warna kuning menunjukkan PEREMPUAN dan LAKI-LAKI

REKAPITULASI DP4 JAWA BARAT PER 1 DESEMBER 2023



Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PROGRESS PEREKAMAN DP4 JAWA BARAT



Kode	Wilayah	Jumlah DP4 (semula, Desember 2022)			Perubahan Status Meninggal	Referensi Status (Kab/Kota)	Referensi Nonaktif (Pemer)	Jumlah DP4 (progress)			Perekaman DP4 (progress)		
		Lk	Pr	Total				Lk	Pr	Total	Rekam	Belum Rekam	%
32	JAWA BARAT	18,617,388	17,870,043	35,887,431	193,474	19,306	17,898,921	17,775,730	35,674,651	35,051,856	622,795	98.25%	
32.01	KAB. BOGOR	1,881,461	1,821,688	3,912,089	16,399	1,861	1,877,368	1,817,089	3,694,457	3,641,110	53,347	98.66%	
32.02	KAB. SUKABUMI	1,033,237	906,467	2,049,634	1,025	884	1,036,657	986,161	1,984,726	1,948,521	36,204	97.66%	
32.03	KAB. CIAMIS	911,991	874,344	1,786,335	6,529	2,313	907,810	876,101	1,778,911	1,735,509	43,402	97.61%	
32.04	KAB. BANDUNG	1,109,961	1,142,747	2,452,708	39,818	933	1,149,381	1,177,771	2,484,004	2,447,844	36,160	98.36%	
32.05	KAB. GARUT	571,598	544,840	1,116,438	11,947	720	569,853	539,220	1,095,084	1,050,624	44,460	97.15%	
32.06	KAB. TASIKMALAYA	714,431	695,596	1,409,351	1,202	2,147	706,977	686,140	1,392,917	1,368,996	23,921	98.26%	
32.07	KAB. CIANGS	487,427	482,202	979,629	3,179	1,200	483,802	480,148	973,111	949,090	24,021	97.53%	
32.08	KAB. KUNINGAN	454,626	450,596	905,221	6,707	113	453,022	447,127	900,199	884,724	15,475	98.27%	
32.09	KAB. CIREBON	683,521	673,811	1,357,332	4,856	195	684,424	675,877	1,359,301	1,324,865	34,436	98.24%	
32.10	KAB. MAJALENGKA	504,461	493,228	1,000,630	13,166	483	493,354	485,222	988,881	980,711	8,170	99.09%	
32.11	KAB. SUKSES	448,464	450,590	899,054	1,369	272	446,446	448,887	895,313	878,489	16,824	98.19%	
32.12	KAB. INDRAMAYU	700,466	689,238	1,400,622	1,515	358	700,364	696,870	1,401,599	1,390,960	10,639	98.46%	
32.13	KAB. SUBANG	600,174	610,058	1,210,232	4,790	994	607,398	607,490	1,214,888	1,177,728	37,160	97.79%	
32.14	KAB. KARAWANG	342,888	335,611	718,511	1,123	154	341,873	341,144	714,644	714,644	0	100%	
32.15	KAB. KARANGAS	911,996	868,148	1,820,144	9,428	233	906,881	903,878	1,810,757	1,779,463	31,294	98.27%	
32.16	KAB. BRUAR	117,781	116,418	234,199	4,899	1,468	111,427	111,127	224,566	218,144	6,422	98.04%	
32.17	KAB. BANDUNG BARAT	664,956	650,469	1,315,325	3,417	1,387	661,109	646,112	1,315,421	1,284,388	31,033	98.01%	
32.18	KAB. PANGANDARAN	357,781	349,413	707,194	799	79	349,108	346,419	695,527	675,965	19,562	98.42%	
32.19	KOTA BOGOR	481,538	484,754	966,292	4,239	712	487,783	481,179	968,962	950,743	18,219	98.03%	
32.20	KOTA BANDUNG	118,891	117,371	236,262	1,499	51	117,868	116,127	234,000	234,000	0	100%	
32.21	KOTA BANDUNG	118,891	117,371	236,262	1,499	51	117,868	116,127	234,000	234,000	0	100%	
32.22	KOTA DEPOK	124,756	117,848	242,604	1,091	41	123,778	124,173	247,951	247,951	0	100%	
32.23	KOTA BEKASI	600,536	605,194	1,205,730	11,371	1,362	606,802	603,065	1,210,867	1,197,404	13,463	98.72%	
32.24	KOTA DEPOK	689,791	712,371	1,402,172	10,444	295	690,699	707,634	1,398,333	1,376,984	21,349	98.92%	
32.25	KOTA CIREBON	237,880	233,471	471,351	6,859	798	239,139	233,113	472,252	471,781	471	99.91%	
32.26	KOTA TASIKMALAYA	273,821	273,830	547,651	4,399	201	273,202	269,138	542,336	543,101	865	99.67%	
32.27	KOTA BANDAR	77,884	78,829	156,713	1,471	14	78,111	78,809	156,920	153,400	3,520	98.40%	

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil per 1 Desember 2023

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PROGRESS PEREKAMAN DP4 PEMULA JAWA BARAT



Kode	Wilayah	Jumlah DP4 (semula, Desember 2022)			Perubahan Status Meninggal	Referensi Status (Kab/Kota)	Referensi Nonaktif (Pemer)	Jumlah DP4 (progress)			Perekaman DP4 (progress)		
		Lk	Pr	Total				Lk	Pr	Total	Rekam	Belum Rekam	%
32	JAWA BARAT	793,581	746,847	1,540,388	633	4,249	790,918	746,568	1,537,486	618,354	59,132	98.29%	
32.01	KAB. BOGOR	90,763	85,876	176,639	64	382	90,583	85,610	176,193	173,246	2,947	99.15%	
32.02	KAB. SUKABUMI	43,610	40,908	83,936	28	159	43,617	40,815	83,732	77,837	5,895	93.07%	
32.03	KAB. CIAMIS	40,669	38,296	78,965	30	114	40,504	38,267	78,821	76,478	2,343	96.02%	
32.04	KAB. BANDUNG	65,662	61,668	127,470	41	263	65,533	61,633	127,166	63,592	43,574	65.23%	
32.05	KAB. GARUT	46,711	41,798	88,518	47	244	46,708	41,838	88,546	83,971	4,575	94.81%	
32.06	KAB. TASIKMALAYA	29,072	27,066	56,138	21	145	28,998	28,965	57,963	57,016	947	98.37%	
32.07	KAB. CIANGS	21,768	20,615	42,383	23	77	21,685	20,960	42,645	42,044	601	98.59%	
32.08	KAB. KUNINGAN	19,008	17,998	37,006	12	26	18,990	17,978	36,968	36,186	782	97.89%	
32.09	KAB. CIREBON	34,484	34,641	69,125	38	146	34,682	34,781	69,463	68,174	1,289	98.19%	
32.10	KAB. MAJALENGKA	19,293	18,994	37,877	31	91	19,298	18,462	37,711	36,881	830	98.06%	
32.11	KAB. SUBANG	17,896	16,693	34,589	6	63	17,778	16,698	34,481	33,807	674	97.74%	
32.12	KAB. INDRAMAYU	27,143	26,094	53,237	9	202	27,049	26,968	53,017	51,483	1,534	96.98%	
32.13	KAB. KARAWANG	24,931	21,412	46,343	11	180	24,860	21,464	46,324	45,644	680	98.32%	
32.14	KAB. PURWAKARTA	16,724	15,987	32,711	8	107	16,697	15,929	32,626	31,957	669	98.27%	
32.15	KAB. KARANGAS	36,987	36,992	73,979	11	131	36,911	36,324	73,235	72,851	384	99.32%	
32.16	KAB. BRUAR	52,211	49,019	101,230	15	77	52,163	49,979	99,148	62,080	37,068	61.68%	
32.17	KAB. BANDUNG BARAT	22,009	22,000	44,009	19	206	22,040	22,133	44,173	44,173	0	100%	
32.18	KAB. PANGANDARAN	6,452	5,920	12,372	14	10	6,338	5,901	12,339	12,117	222	97.66%	
32.19	KOTA BOGOR	16,194	17,131	33,311	16	116	16,241	17,035	33,276	32,690	586	98.66%	
32.20	KOTA BANDUNG	6,044	5,858	11,902	11	141	6,098	5,847	11,945	8,740	3,205	72.56%	
32.21	KOTA DEPOK	41,080	40,994	82,074	37	171	41,077	40,877	81,924	81,515	409	99.52%	
32.22	KOTA BEKASI	6,044	5,700	11,744	7	17	6,044	5,691	11,741	6,699	1,042	74.69%	
32.23	KOTA CIREBON	42,116	39,652	81,768	41	460	41,791	39,311	81,060	84,317	26,743	67.03%	
32.24	KOTA DEPOK	32,732	30,861	63,593	35	136	32,642	30,778	63,420	48,406	15,014	76.32%	
32.25	KOTA CIREBON	9,511	9,520	19,031	9	51	9,493	9,499	18,992	18,992	0	100%	
32.26	KOTA TASIKMALAYA	12,447	11,260	23,707	15	87	12,387	11,268	23,655	23,387	268	99.50%	
32.27	KOTA BANDAR	3,476	3,290	6,766	11	61	3,469	3,290	6,759	3,994	2,765	60.60%	

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil per 1 Desember 2023

Fasilitasit terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



PROGRESS PEREKAMAN DP4 PEMULA DAPODIK JAWA BARAT

Kode	Wilayah	Jumlah DP4 (sensus Desember 2022)			Perubahan Status Meringgat	Referensi Nonaktif (Cakr/Kate)	Jumlah DP4 (progres)			Percakman DP4 (Progres)							
		Lk	Pv	Total			Lk	Pv	Total	Hukum	Blm Hukum	No					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	JAWA BARAT	519,764	497,587	1,017,351	19	545	519,512	497,275	1,016,787	574,733	442,954	56,929					
32.01	KAB. BOGOR	59,207	58,161	117,368	0	23	58,894	58,894	117,788	73,494	73,494	0					
32.02	KAB. SUKADIRI	20,036	20,339	40,375	0	13	20,027	20,333	40,360	22,950	22,950	0					
32.03	KAB. CANGREU	29,001	23,427	52,428	0	29	28,994	23,423	52,417	27,944	27,944	0					
32.04	KAB. BANDUNG	29,841	28,795	58,636	1	51	29,842	28,791	58,633	30,782	27,832	64,379					
32.05	KAB. GARUT	29,841	28,490	58,331	0	27	29,841	28,489	58,330	29,186	27,044	37,044					
32.06	KAB. TASIKMALAYA	49,832	49,732	99,564	0	29	49,811	49,695	99,506	73,251	66,255	89,255					
32.07	KAB. CIAMIS	15,002	14,732	29,734	1	8	15,004	14,730	29,734	14,027	15,707	45,105					
32.08	KAB. KUNTINGAN	12,501	12,445	24,946	1	4	12,547	12,441	24,988	12,280	12,200	51,105					
32.09	KAB. CIURENAN	12,476	12,450	24,926	0	26	12,466	12,432	24,898	14,704	14,626	45,305					
32.10	KAB. MALARANGKA	13,619	13,364	26,983	0	4	13,613	13,361	26,974	11,640	10,034	44,067					
32.11	KAB. SUMBERGAWI	13,237	12,871	26,108	1	11	13,233	12,863	26,096	11,941	13,032	46,105					
32.12	KAB. INDRAMAYU	17,209	16,858	34,067	0	21	17,197	16,846	34,043	18,132	16,011	53,115					
32.13	KAB. SUKSES	18,111	17,888	36,000	1	41	18,109	17,887	36,000	19,388	20,620	20,705					
32.14	KAB. PURWAKAJA	11,272	10,782	22,054	0	8	11,272	10,772	22,044	12,493	9,789	35,823					
32.15	KAB. KARAWANG	23,039	21,229	44,268	0	11	23,032	21,221	44,253	20,900	20,900	46,105					
32.16	KAB. BEKASI	33,372	31,528	64,900	1	22	33,359	31,518	64,877	34,468	30,409	53,135					
32.17	KAB. BANDUNG BARAT	16,735	17,782	34,517	0	40	16,710	17,717	34,427	16,783	17,094	50,605					
32.18	KAB. BANDUNGGAR	4,676	4,583	9,259	0	2	4,675	4,583	9,258	4,794	4,703	53,005					
32.19	KOTA BOGOR	11,740	11,376	23,116	0	10	11,734	11,373	23,107	10,380	6,228	74,015					
32.20	KOTA SUKABUMI	4,470	4,440	8,910	1	3	4,469	4,440	8,909	4,225	4,225	21,405					
32.21	KOTA BANDUNG	31,862	30,661	62,523	0	20	31,849	30,650	62,500	40,983	31,225	65,725					
32.22	KOTA CIURENAN	4,377	3,990	8,367	0	1	4,377	3,989	8,366	8,760	3,205	21,425					
32.23	KOTA GARUT	28,151	26,250	54,401	1	20	28,152	26,249	54,401	32,249	32,249	41,105					
32.24	KOTA KARAWANG	22,413	22,200	44,613	0	20	22,413	22,200	44,613	14,387	11,789	74,015					
32.25	KOTA KAMARI	7,446	7,045	14,491	0	20	7,447	7,043	14,490	12,293	2,137	89,235					
32.26	KOTA TASIKMALAYA	9,402	9,400	18,802	0	22	9,402	9,400	18,802	17,472	3,105	44,015					
32.27	KOTA BANJAR	5,512	5,400	10,912	0	1	5,514	5,400	10,914	4,425	4,425	46,125					

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil per 1 Desember 2023

MANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN SESUAI DENGAN UU 24/2013 PASAL 58 AYAT (4) BAHWA DATA KEPENDUDUKAN YANG DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KEPERLUAN ADALAH DATA KEPENDUDUKAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, ANTARA LAIN PEMANFAATAN:UNTUK

Pelayanan Publik •Izin Usaha •Pelayanan Pajak •Kendaraan •Bank •Pemberian bantuan sosial/pemerintah	Perencanaan Pembangunan •Perencanaan Pendidikan •Perencanaan Kesehatan	Alokasi Anggaran • Perencanaan Dana • Alokasi Umum • Alokasi Dana Khusus • Alokasi Dana Desa	Pembangunan Demokrasi data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dan (DAK2)	Penegakan hukum dan pencegahan kriminal •memudahkan pelacakan pelaku criminal •dll
---	---	---	---	---



POTENSI KERAWANAN PEMILU PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILU 2024

1. NIK tidak ditemukan
2. NIK ganda
3. Warga yang telah meninggal dunia masuk dalam DP4/DPS/DPT
4. Warga yang belum melakukan Perekaman
5. Perubahan status (Pindah Datang/Nikah/TNI/Polri)
6. Pemusnahan KTP-el
7. NIK bagi WNA unprosedur

DUKUNGAN DUKCAPIL TERHADAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Provincial Government Of West Java

1

Pemutakhiran Data/oleh Pusat

- Sinkronisasi Data Pemilih dengan Data Penduduk melalui proses pemadanan data dan updating data pemilih yang berubah karena diterbitkannya akta kematian, akta perkawinan non muslim dan pindah datang; dan
- Penyediaan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU yang akan berfungsi untuk verifikasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK)

2

Pengamanan Data/oleh Pusat

- Berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk penyerahan data DP4 kepada KPU;
- Melakukan enkripsi 11 elemen data dengan menggunakan metode Advanced Encryption Standard (AES) 256;
- Membangun sistem untuk melakukan proses enkripsi dengan menggunakan kunci dari BSSN; dan
- Kunci enkripsi dan dekripsi disimpan pada padlock yang sudah disepakati antara Ditjen Dukcapil dan KPU

3

Persiapan menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/ oleh Daerah

- Penuntasan target perekaman KTP-el utama, yaitu wajib KTP sampai dengan 14 Februari 2024 melalui perekaman jemput bola;
- Mulai melakukan perekaman wajib KTP pemula tahun 2023 dan tahun 2024 melalui perekaman ke sekolah-sekolah dan gerakan Dukcapil Goes To Campus;
- Entri NIK baru dengan usia lebih dari 17 tahun wajib langsung dilakukan perekaman KTP-el; dan
- Pendataan penduduk terlarut untuk kaum marginal atau miskin ekstrim, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), nara pidana, disabilitas, daerah terpencil dan transgender.

PRINSIP Pengelolaan Data Pemilih

1 TERBUKA

2 DAPAT DIAKSES MASYARAKAT

3 JAMINAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA PRIBADI



COKLIT / PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

AKAN BERAKHIR TANGGAL 14 MARET 2023

Perlu dilakukan percepatan perekaman dan merapikan data penduduk

1

Perekaman KTP-el Jemput Bola

2

Menonaktifkan wajib KTP belum rekam yang sudah meninggal, pindah tanpa lapor atau tidak ditemukan

3

Melakukan pemilahan data penduduk bagi daerah yang mengalami pemekaran desa/kel yang belum tuntas

4

Penonaktifan data WNA yang dientri sebagai WNI



LANGKAH/UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH DISDUKCAPIL JABAR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA & PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PEMILIH



STRATEGI PENINGKATAN PEREKAMAN KTP-EL



STRATEGI PENINGKATAN PEREKAMAN KTP-EL



Perekaman/Penerbitan KTP-el

1

FASILITASI PERCEPATAN PEREKAMAN BAGI WARGA GUNA SUKSES PEMILU 2024

Perekaman KTP-el bagi WNI yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau yang telah menikah tapi belum berumur 17 tahun dan belum melakukan Perakaman KTP-el



DEPOK-- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok melakukan layanan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el atau E-KTP di SMAN 4 Depok, Senin (20/6/2022). Sebanyak 261 siswa di SMAN 4 Depok menjadi

Perekaman/Penerbitan KTP-el bagi Pelajar

2

Fasilitasi Perekaman wajib KTP-el bagi Pemula ke sekolah-sekolah/ Layanan Jemput Bola

14:39 62%
 INDOSATU NEWS.COM
 News Daerah Olahraga Nasional Intern
 News, Utama
Jelang Pemilu 2024, Lapas Cikarang Gandeng Disdukcapil Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih
 R. Dede
 Januari 31, 2023



CIKARANG – Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, Lapas Cikarang gandeng Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi lakukan pemutakhiran serta sinkronisasi data dan NIK, penerbitan

3
 Sinkronisasi NIK, Pengecekan Sidik Jari /Iris Mata/Face Detection terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum diketahui identitas kependudukannya

disdukcapil Jabar

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT DAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
 PEMUTAKHIRAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN PEMASARKATAN PADA LAPAS DAN RUTAN SE-JAWA BARAT

NOMOR : W.11-3842.HH.04.03 Tahun 2023
 NOMOR : 208/PMU.06.00/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (13-03-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. R. ANDIKA DAVI PRASETYA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Jakarta Nomor 27, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut PPSK KESATU.

II. HJ. INDIRASTUTI CHANDRA DEWI S. : PR. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Ciumbuleuit Nomor 2, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 37706/02.02/2019/PTN tanggal 19 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PPSK KEDUA.

PPSK KESATU dan PPSK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut PARA PPSK, dan masing-masing disebut PPSK.

ketikNews
 jendela Informasi Dunia
 News Pariwisata Ragam Indonesia Life

Nasional

Akta Kematian jadi Dokumen Penting Jelang Pemilu 2024, Berikut Alasannya
 Tatan Mulyana
 Selasa, 14 Maret 2023 | 13:28 WIB



Akta Kematian (Dok. Kemendagri)
 Penerbitan Akta Kematian

4
 Fasilitasi Penerbitan Akta Kematian bagi WNI yang telah meninggal dunia dan masih tercatat dalam Data Kependudukan dalam rangka update data pemilih

disdukcapil Jabar

Ribuan E-KTP yang Berceceran di Serang Dibuang Oknum Staf Kecamatan
 Kastolasi - Selasa, 11 September 2018 - 21:30:00 WIB



Ribuan lembar e-KTP ditemukan berserakan di dekat sampah pinggir jalan Kampung Banjarsari, Cikande, Serang. (Foto: SMDNews)

Pemusnahan blanko rusak, data valid, pergantian elemen data dilakukan setiap hari

MITIGASI POTENSI PERMASALAHAN PEMILU

PEMUSNAHAN KTP-el HARUS SETIAP HARI DILAKUKAN PEMUSNAHAN TERSEBUT TIDAK HARUS DI UPLOAD DI SOSIAL MEDIA

Temuan Sekarung e-KTP, Dirjen Dukcapil Pastikan Tak Ada Sistem Keamanan yang Jebol
 Senin, 10 Desember 2018 15:13
 Reporter : Hari Ariyanti



Pemusnahan e-KTP sekarung oleh warga Pondok Kopi. ©2018 Liputan6.com

Dukcapil Denpasar Buka Suara soal WN Suriah dan Ukraina Punya KTP WNI

kumparanNEWS

8 Maret 2023 22:36 · waktu baca 2 menit

1 3



Ilustrasi KTP. Foto: Shutterstock

Penerbitan NIK untuk Orang Dewasa harus diverifikasi minimal oleh Kepala Bidang. Untuk yang wajahnya mirip dengan WNA mohon ditanyakan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Daerah dan ditanyakan paspornya.

MITIGASI POTENSI PERMASALAHAN PEMILU

WARGA NEGARA ASING YANG DI ENTRI SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
PERLU KEHATI-HATIAN PENERBITAN NIK BARU BAGI PENDUDUK USIA DEWASA

Polisi Periksa Dua Oknum Disdukcapil Kota Kendari yang Nekat Palsukan KTP WNA Asal Tiongkok



TERIMA KASIH



C. Paparan KPU Provinsi Jawa Barat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA 14/2 2024

jabar.kpu.go.id kpuprovinsijabar KpuProvJabar kpu_provjabar KPU Provinsi Jawa Barat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat

JUMLAH KABUPATEN/KOTA: 27
JUMLAH KECAMATAN: 627
JUMLAH DESA/KEKELURAHAN: 5.957

JUMLAH TPS: 17.958.814
JUMLAH TPS: 140.457

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
35.714.901

JUMLAH LOKASI KHUSUS: 50
JUMLAH TPS KHUSUS: 130
JUMLAH PEMILIH LOKASI KHUSUS: 28.760

TOTAL PEMILIH DISABILITAS: 146.751

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat

JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN GENERASI

7.407.490 (10,4%)
11.603.822 (32,5%)
10.658.794 (29,8%)
5.509.677 (15,4%)
535.118 (1,5%)

Generasi Z (17-24 Tahun) | Generasi X (40-55 Tahun) | Lansia (>75 Tahun)
Milenial (25-39 Tahun) | Baby Boomer (56-76 Tahun)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

JUMLAH PEMILIH BERUSIA 17 TAHUN SAAT 14 FEBRUARI 2024

JUMLAH PEMILIH BERUSIA 17 TAHUN SAAT 14 FEBRUARI 2024 DI JAWA BARAT SEBANYAK **634,509 PEMILIH** DENGAN RINCIAN LAKI LAKI SEBANYAK **326,606** DAN PEREMPUAN SEBANYAK **307,903**

JUMLAH PEMILIH GANDA
JUMLAH PEMILIH GANDA **SUDAH TIDAK ADA** DI JAWA BARAT

JUMLAH PEMILIH NON KTP-EL
JUMLAH PEMILIH NON KTP-EL YANG TERDAPAT DI DPT JAWA BARAT SEBANYAK **687,805 PEMILIH**

JUMLAH PEMILIH TIDAK DIKENAL
JUMLAH PEMILIH TIDAK DI KENAL **SUDAH TIDAK ADA** DI JAWA BARAT

JUMLAH PEMILIH YANG DIBAWAH USIA 17 TAHUN DAN BELUM MENIKAH
JUMLAH PEMILIH YANG DIBAWAH USIA 17 TAHUN DAN BELUM MENIKAH **SUDAH TIDAK ADA** DI JAWA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KPU
Malaysia

KESIAPAN KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JABAR PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024

- Terkait Jadwal Kampanye, akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 11 Februari 2024.
- Terkait Alat Peraga Kampanye, Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 270 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
Bentuk Koordinasi
- Provinsi Jawa Barat dengan pihak Kepolisian Penandatanganan Naskah Perjanjian Kersajama dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bentuk Koordinasi Provinsi Jawa Barat dengan calon peserta Pemilu yaitu sudah dilaksanakan Sosialisasi, Rakor dan Evaluasi SIDAKAM kepada Partai Politik dan Calon DPD

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KPU
Malaysia

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KPU PROVINSI JABAR AGAR SELURUH JAJARAN PENYELENGGARA DI SETIAP TINGKATAN BENAR-BENAR MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING, DAN JUGA MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SAMA TERHADAP BERBAGAI PERATURAN YANG ADA

1. Berkoordinasi dengan setiap hirarki tingkatan penyelenggara pemilu baik melalui jalur komunikasi digital, maupun dengan pertemuan langsung,
2. Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat yang salah satu konten isinya adalah mengenai peraturan-peraturan KPU mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan yang teraktual.
3. Mengadakan supervisi dan monitoring ke KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap-tahapan atau kegiatan yang telah dilaksanakan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KPU
Malaysia

KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT ATURAN KAMPANYE KPU KEPADA PARA PESERTA PEMILU SERTA EVALUASINYA HINGGA SAAT INI

Segera setelah KPU Republik Indonesia Menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan berbagai pihak, antara lain :



- Sosialisasi Penyuluhan Kampanye Kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada tanggal 21 September 2023.
- Sosialisasi Penyuluhan Kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 21 September 2023.
- Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Sosialisasi Regulasi Kampanye Bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholder pada tanggal 20 November 2023
- Rapat Koordinasi (SIDAKAM) kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 22 November 2023
- Rapat Koordinasi (SIDAKAM) kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada tanggal 22 November 2023
- Rapat Evaluasi Penginputan serta Pemantapan penggunaan (SIDAKAM) kepada Partai Politik pada tanggal 29 November 2023
- Rapat Evaluasi Penginputan serta Pemantapan penggunaan (SIDAKAM) kepada Calon Anggota DPD pada tanggal 29 November 2023

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT 

▶ KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDERS TERKAIT DENGAN MEMPERHATIKAN TITIK-TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DILARANG OLEH PERDA



Terkait dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU No 15 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu terutama penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholder pada tanggal 20 November 2023.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi antara Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan Peraturan Daerah terkait, selain itu KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kompilasi Seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pemasangan APK berdasarkan kesepakatan KPU Kabupaten/Kota dengan masing-masing Pemerintah Daerah, untuk kemudian dituangkan ke dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 270 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT 

▶ DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI JABAR KEPADA KPU, KHUSUSNYA TERKAIT FASILITASI SEKRETARIAT, SARANA PRASARANA DAN PENUGASAN PERSONIL UNTUK PANITIA PEMILIH KECAMATAN MAUPUN PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jabar kepada KPU, khususnya terkait fasilitas sekretariat, sarana dan prasarana dan penugasan personil untuk Panitia Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pemungutan Suara sudah baik, meskipun belum maksimal. Diantaranya terkait sekretariat yang kurang memadai, sarana prasarana seadanya, belum dilengkapi dengan komputer/laptop, printer, scanner, dan alat kelengkapan lainnya. Dan belum semua Pemerintah Daerah di Provinsi Jabar memberikan jaminan asuransi kepada penyelenggara Pemilu.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT 

▶ PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024 TAHAP 1, APA SAJA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KPU DI WILAYAH PROVINSI JABAR DAN PERSIAPAN UNTUK PROSES PENGADAAN TAHAP 2

Logistik Tahap 1 yang berupa kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel, sudah diterima 100 % di gudang logistik KPU kabupaten/kota. Sedangkan segel plastik masih dalam proses pengiriman dari penyedia yang kontraknya berakhir tanggal 7 Desember 2023.

Logistik Tahap 2 yang berupa surat suara, formulir, sampul, dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra (ABTN) masih dalam proses produksi. Sampai tanggal 5 Desember 2023, baru 3 kabupaten/ kota yang sudah menerima surat suara DPRD kabupaten/kota yaitu KPU Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Bekasi, dan KPU Kota Cimahi.

Data terlampir pada link berikut : <https://bit.ly/LogKPUProvJaBar>

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KPU
Relayand

**PROSES PEMBAHASAN NPHD UNTUK PILKADA SERENTAK 2024 ANTARA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI JABAR DENGAN PEMERINTAH DAERAH MASIING-MASING**

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se Jawa Barat seluruhnya telah melaksanakan penandatanganan NPHD dengan Pemerintah Daerah Masing-masing. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan serentak pada tanggal 9 November 2023 bertempat di Aula Gedung Sate Bandung, kecuali Kabupaten Garut yang telah terlebih dahulu melakukan penandatanganan NPHD pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Kabupaten Sumedang Pada tanggal 20 November 2023.

Seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat juga telah bersepakat terkait besaran anggaran pilkada di daerah masing-masing walaupun ada beberapa daerah yang tidak dapat memenuhi persentase Pencairan yang dilakukan 40% di Tahun 2023 dan 60% di Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

14
Desember
2023

HATUR NUHUN

↑ ↑ ↑

jabar.kpu.go.id
[kpuprovincijabar](https://www.instagram.com/kpuprovincijabar)
[KpuProvJabar](https://www.facebook.com/KpuProvJabar)
[kpu_provjabar](https://twitter.com/kpu_provjabar)
[KPU Provinsi Jawa Barat](https://www.youtube.com/KPUProvinsiJawaBarat)

D. Paparan Bawaslu Provinsi Jawa Barat



KESIAPAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA BARAT

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

OUTLINE KESIAPAN TAHAPAN PEMILU

- Pengawasan Tahapan Pencalonan Legislatif
- Pengawasan Tahapan Daftar Pemilih
- Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu
- Pembinaan tugas dan fungsi Pengawas Pemilu
- Koordinasi dengan Instansi di Jawa Barat
- Pengawasan Partisipatif
- Hasil Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu di Jawa Barat
- Hasil Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Tahap I

HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DPRD/DPD DI PROVINSI JAWA BARAT

Bakal Calon Anggota DPD Prov Jabar:

- a. Jumlah balon: 55 org
- b. Jumlah MS: 7 org
- c. Jumlah BMS: 48 org

Bakal Calon Anggota DPRD Prov Jabar:

- a. Jumlah balon : 2130 org (dri 18 parpol)
- b. Jumlah MS: 177 org (8,3%)
- c. Jumlah BMS: 1953 org (91,6%)

FAKTOR DOMINAN PENYEBAB BMS:

- a. ketidaksesuaian identitas : (nama berbeda antara KTP dengan surat pencalonan, NIK dalam SILON dengan KTP berbeda, tanggal lahir berbeda antara KTP dengan surat pencalonan, dll)
- b. kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang diupload kedalam SILON (tidak melampirkan ijazah terlegalisir dri lembaga berwenang, surat keterangan jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan dari pengadilan, tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih, dll)
- c. Kekeliruan upload dokumen persyaratan dalam SILON

NO	PARTAI	JUMLAH BMS	JUMLAH DAPIL PERBAIKAN
1	PKS	101	3
2	PAN	116	9
3	PPP	117	13
4	NASDEM	97	10
5	PKB	102	8
6	BURUH	109	7
7	PDI-P	111	6
8	DEMOKRAT	120	11
9	PERINDO	72	12
10	GELORA	101	13
11	GOLKAR	104	9
12	PKN	120	11
13	HANURA	119	13
14	PSI	107	9
15	GERINDRA	100	7
16	UMMAT	117	14
17	GARUDA	120	15
18	PBB	120	15

CATATAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DPRD/DPD DI PROVINSI JAWA BARAT

- tingginya jumlah bakal calon yang berstatus BMS (91,6%) menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu untuk memastikan para bakal calon mengetahui status tersebut dan memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melempai kekurangannya. Serta memastikan tata cara prosedur perbaikannya dilaksanakan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg berlaku.
- Hal tersebut Upaya melindungi hak bakal calon peserta serta memastikan bakal calon yg menjadi peserta pemilu merupakan figur-figur yang berkualitas dan telah terkuualifikasi.
- kendala dan permasalahan yg menyebabkan status bakal calon BMS berpotensi menjadi permasalahan di tahapan selanjutnya. Untuk memitigasi/mencegah munculnya potensi Sengketa Proses Pemilu maupun Pelanggaran Administratif Pemilu segala informasi terkait status, dll harus diketahui secara utuh dan komprehensif, kekurangan harus diperbaiki/dilengkapi sesuai prosedur yg berlaku yaitu PKPU 10 tahun 2022, PKPU 11 tahun 2023, serta Surat KPU Nomor 690/PL.01.4-SD/05/2023.

Fokus Utama Pengawasan

- Kelengkapan dan keabsahan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan
- Potensi kegandaan pencalonan dan prosedur tindaklanjutnya
- Pengamatan terkait kepatuhan prosedur dalam proses Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD maupun DPRD Provinsi Jawa Barat/DPRD Kabupaten/Kota. (Terkait waktu, tata cara prosedur,dll)
- Pendokumentasian seluruh peristiwa dalam proses pengawasan di KPU

HASIL PENGAWASAN PENGAJUAN PERBAIKAN PENCALONAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

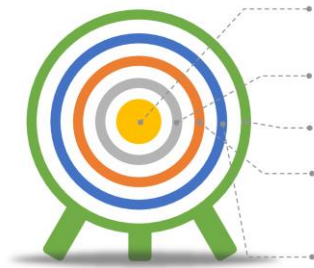
NO.	PARTAI	WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN	WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN SESU SURAT KPU NOMOR: 700	KETERANGAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9 Juli 2023 pukul 15.04 WIB	-	Lengkap dan diterima 15 dapil
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	9 Juli 2023 pukul 21.30 WIB	16 Juli 2023 pukul 14.18 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI/P)	9 Juli 2023 pukul 15.48 WIB	16 Juli 2023 14.06 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
4.	Partai Golkar	9 Juli 2023 pukul 21.09 WIB	15 Juli 2023 pukul 12.30 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
5.	Partai Nasdem	9 Juli 2023 pukul 15.03 WIB	14 Juli 2023 pukul 18.27 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
6.	Partai Buruh	9 Juli 2023 pukul 15.13 WIB	16 Juli 2023 pukul 12.16	Lengkap dan diterima 15 dapil
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	9 Juli 2023 pukul 19.03 WIB	16 Juli 2023 pukul 15.26 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9 Juli 2023 pukul 08.17 WIB	-	Lengkap dan diterima 15 dapil
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	9 Juli 2023 pukul 20.05 WIB	16 Juli 2023 pukul 13.41 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
10.	Partai Hati NUrani Rakyat (HANURRA)	9 Juli 2023 pukul 21.14 WIB	15 Juli 2023 pukul 19.23	Lengkap dan diterima 15 dapil
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	9 Juli 2023 pukul 23.12 WIB	16 Juli 2023 pukul 16.03 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	9 Juli 2023 pukul 13.27 WIB	16 Juli 2023 pukul 13.16 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	9 Juli 2023 pukul 22.57 WIB	16 Juli 2023 pukul 15.40 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
14.	Partai Demokrat	9 Juli 2023 pukul 17.55 WIB	16 Juli 2023 pukul 15.04 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	9 Juli 2023 pukul 21.20 WIB	16 Juli 2023 pukul 17.12 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	9 Juli 2023 pukul 19.00 WIB	15 Juli 2023 pukul 15.39 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9 Juli 2023 pukul 16.09 WIB	16 Juli 2023 pukul 10.40 WIB	Lengkap dan diterima 15 dapil
18.	Partai Ummat	9 Juli 2023 pukul 22.43 WIB	16 Juli 2023 pukul 15.02	Lengkap dan diterima 15 dapil



Catatan Hasil Pengawasan Penetapan DCT-I

- Pengawasan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada Hari Jumat, 03 November 2023 di hotel Savoy Homan dimulai pukul 14.30 WIB s.d. Pukul 16.00 WIB. KPU Provinsi Jawa Barat melalui Ketua Divisi Teknis Bpk. Adi Saputro menyampaikan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pemilu Tahun 2024;
- KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pada Pemilu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 258 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Telah dilakukan Penandatanganan Persetujuan Surat Suara DCT Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Partai Politik dengan disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat beserta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- Pengawasan Penetapan DCT oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KEPATUHAN PROSEDUR COKLIT DAFTAR PEMILIH



- Jumlah Pantarlih yang tidak menempelkan Model A Stiker setelah melakukan proses coklit berjumlah 284 Pantarlih
- Jumlah KK yang sudah dilakukan Proses Coklit tetapi belum di tempel Model A – Stiker berjumlah 647 KK
- kejadian pantarlih yang tidak menempelkan Stiker dan jumlah KK yang di Coklit tidak di tempel stiker berada di 179 Kelurahan/Desa
- Jumlah Pantarlih yang mengalih tugaskan proses coklit kepada pihak yang tidak berwenang (diluar SK) 48 Pantarlih
- Jumlah KK yang dilaksanakan coklit bukan oleh petugas Pantarlih sejumlah 99 KK



Catatan Hasil Pengawasan Penetapan DCT-II

- Bahwa adapun secara umum hasil Pengawasan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Jumlah Calon Legislatif dalam DCT:
 - Laki – Laki = 1191
 - Perempuan = 658
 - Jumlah = 1849
 - Jumlah Calon DPD dalam DCT:
 - Laki – Laki = 43
 - Perempuan = 11
 - Jumlah = 54
- Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam Pleno menyampaikan catatan hasil Pengawasan Pencecramatan DCT, yang pada pokoknya masih terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam DPT dengan klasifikasi pekerjaan wajib mundur dan/atau diharuskan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi Terkait, KPU Jawa Barat dalam menghitung kuota 30 % keterwakilan Perempuan masih menggunakan dasar PKPU 10 Tahun 2023, sehingga diketahui tidak berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 24.

REKAPITULASI DCT DPRD PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILU 2024

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAFTAR	JUMLAH CALON LAKI LAKI	JUMLAH CALON PEREMPUAN	JUMLAH CALON	% KETERWAKILAN PEREMPUAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15	80	40	120	33,33%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	15	76	44	120	36,67%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15	78	42	120	35%
4	Partai Gelombang Rakyat	15	81	39	120	32,5%
5	Partai NasDem	15	80	37	120	30,83%
6	Partai Buruh	15	69	42	111	37,84%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15	51	25	76	32,89%
8	Partai Keadilan Sejahtera	15	76	44	120	36,67%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	15	54	21	75	28,00%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	15	66	35	101	34,65%
11	Partai Garuda Republik Indonesia	15	19	13	32	40,63%
12	Partai Amanat Nasional	15	77	43	120	35,83%
13	Partai Bulan Bintang	15	64	45	107	42,15%
14	Partai Demokrat	15	80	39	120	32,5%
15	Partai Solidaritas Indonesia	15	49	27	76	35,53%
16	Partai Persatuan Indonesia	15	74	46	120	38,33%
17	Partai Persebaran Pembangunan	15	77	43	120	35,83%
18	Partai Ummat	15	56	35	91	38,46%
JUMLAH TOTAL			1.191	658	1.849	30%



PENGAWASAN BAWASLU DALAM TAHAPAN DPT

PENGAWASAN LANGSUNG/MELEKAT

- Mengawasi pelaksanaan tahapan yang diselenggarakan oleh KPU beserta jajarannya
- Mengawasi pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih sesuai tingkatan

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

- Uji Petik atas Kinerja Coklit Pantarlih
- Patroli Kawal Hak Pilih ke Pemilih Rentan/Lokasi Khusus
- Penyandingan Data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Monitoring dan Supervisi secara berjenjang

PENGAWASAN PARTISIPATIF

- Koordinasi dan konsolidasi stakeholder di masing-masing tingkatan
- Sosialisasi bersama masyarakat
- Edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat

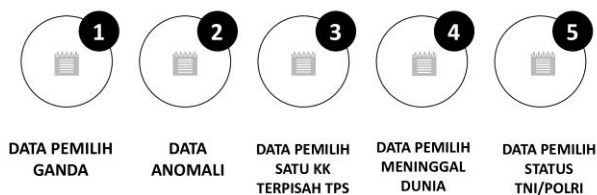
FOKUS PENGAWASAN COKLIT DAFTAR PEMILIH

- LEGALITAS PANTARLIH** ➤ Panwaslu Kelurahan/Desa menguji kebenaran dokumen penetapan Pantarlih melalui Surat Keputusan dan memastikan kesesuaian antara nama petugas dengan orang yang melakukan Coklit.
- KEPATUHAN JADWAL** ➤ Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan waktu pelaksanaan Coklit sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan selama 30 hari, tidak melebihi batas waktu 30 hari.
- KELENGKAPAN ALAT KERJA** ➤ Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan kelengkapan formulir wajib dibawa oleh Pantarlih saat melakukan Coklit daftar pemilih.
- KEPATUHAN PROSEDUR** ➤ Panwaslu Kelurahan/Desa diinstruksikan untuk mengamati seluruh tahapan yang menjadi prosedur kerja yang harus dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit daftar pemilih, antara lain: mendatangi pemilih, mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat, memperbaiki data yang keliru, mencatat keterangan disabilitas, menambahkan data pemilih baru, dan menempelkan stiker pada rumah pemilih yang telah dicoklit.
- PENILAIAN AKURASI** ➤ Panwaslu Kelurahan/Desa mengamati terhadap akurasi pencatatan hasil Coklit oleh Pantarlih, misalnya jumlah KK per TPS, jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, dan jumlah pemilih yang Memenuhi Syarat.
- KOORDINASI PIHAK TERKAIT** ➤ Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam rangka pelaksanaan Coklit daftar pemilih.

HASIL PENGAWASAN COKLIT DAFTAR PEMILIH

1. Bahwa ditemukan Pantarlih yang tidak dapat menunjukan SK sebanyak 1638 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
2. Bahwa ditemukan Pantarlih yang melaksanakan Coklit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebanyak 249 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
3. Bahwa ditemukan Pantarlih yang tidak mencatat Keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas sebanyak 376 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
4. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el jika dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan Salinan KTP-el sebanyak 486 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
5. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 264 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
6. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 361 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
7. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya sebanyak 344 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
8. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK sebanyak 103 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
9. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencatat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih sebanyak 140 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut;
10. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit sebanyak 179 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjut.

FOKUS PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)



PERMASALAHAN FAKTUAL COKLIT DAFTAR PEMILIH

1. Terdapat Pantarlih yang masih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Coklit
2. Terdapat Pantarlih yang belum melaksanakan Coklit karena Permasalahan distribusi Logistik Coklit
3. Aplikasi e-Coklit yang tidak di gunakan sebagai alat bantu coklit dan menggunakan Model A- Daftar Pemilih untuk dilakukan coklit secara manual
4. Terdapat Pantarlih yang mengalih tugaskan Pencocokan dan Penelitian kepada orang lain, misal RT/RW maupun istri dan anaknya.
5. Masih terdapat data pemilih yang sudah Meninggal masih tercatat dalam Model A- Daftar Pemilih
6. Terdapat Pantarlih yang melaksanakan Coklit tidak menempelkan Stiker dikarenakan Habis
7. Akses data yang sulit dalam melaksanakan Pengawasan Pemutakhiran DPT terutama dalam tahapan Coklit mengakibatkan pengisian alat kerja tidak dapat terpenuhi
8. Masih terdapat KK terdampak Relokasi Bencana, Relokasi Pembangunan, Pembebasan Lahan yang masih memiliki KTP-el Lokasi lama yang berpotensi tidak dapat dilakukan proses pencoklitian.

HASIL PENGAWASAN UJI PETIK DAFTAR PEMILIH

No.	Kab/Kota	Rekapitulasi jumlah hasil pengawasan Kepala Keluarga di tingkat provinsi			
		Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker	Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker	Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker	Jumlah Total Uji Petik
1	KABUPATEN BOGOR	136	25	67,182	67,343
2	KABUPATEN SUKABUMI	24	1	74,946	74,971
3	KABUPATEN CIANJUR	34	19	76,876	76,929
4	KABUPATEN BANDUNG	301	266	28,306	28,873
5	KABUPATEN GARUT	129	18	143,86	144,007
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	609	6	67,589	68,204
7	KABUPATEN CIAMIS	24	0	47,314	47,338
8	KABUPATEN KUNINGAN	15	0	63,879	63,894
9	KABUPATEN CIREBON	27	17	194,578	194,622
10	KABUPATEN MAJALENGKA	18	3	77,215	77,236
11	KABUPATEN SUMEDANG	177	10	28,028	28,215
12	KABUPATEN INDRAMAYU	100	58	66,412	66,57
13	KABUPATEN SUBANG	23	6	409,134	409,163
14	KABUPATEN PURWAKARTA	41	0	250,168	250,209
15	KABUPATEN KARAWANG	24	9	25,383	25,416
16	KABUPATEN BEKASI	36	2	54,192	54,23
17	KABUPATEN BANDUNG BARAT	144	8	11,35	11,502
18	KABUPATEN PANGANDARAN	138	0	6,804	6,942
19	KOTA BOGOR	16	7	8,954	8,977
20	KOTA SUKABUMI	0	0	5,011	5,011
21	KOTA BANDUNG	169	6	23,234	23,409
22	KOTA CIREBON	14	0	4,316	4,33
23	KOTA BEKASI	9	0	10,662	10,671
24	KOTA DEPOK	95	1	1,231	1,327
25	KOTA CIMAHI	0	0	2,61	2,61
26	KOTA TASIKMALAYA	16	29	13,215	13,26
27	KOTA BANJAR	0	0	56,065	56,065
	JUMLAH	2,183	466	1,751,332	1,753,981

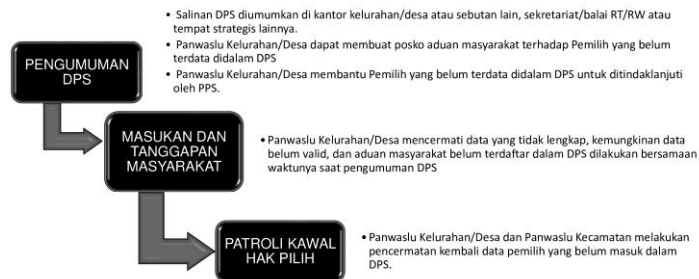
1. Jumlah Kepala Keluarga yang di Uji Petik sebanyak 1,753,981 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) Kepala Keluarga.
2. Terdapat data Kepala Keluarga yang Sudah di Coklit dan tidak di tempel stiker sebanyak 2,183 (dua ribu seratus delapan puluh tiga) Kepala Keluarga.
3. Terdapat data Kepala Keluarga yang Belum di Coklit dan Sudah di tempel stiker sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) Kepala Keluarga dan.
4. Terdapat data Kepala Keluarga Hasil Uji Petik yang sudah di Coklit dan Sudah di tempel Stiker sebanyak sebanyak 1,753,981 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) Kepala Keluarga

FOKUS PENGAWASAN PENYUSUNAN DPS



KEPATUHAN PROSEDUR	PENILAIAN AKURASI	IDENTIFIKASI LOKASI KHUSUS
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk mengamati seluruh tahapan yang menjadi prosedur kerja yang harus dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan daftar pemilih	Panwaslu Kelurahan/Desa mengamati terhadap akurasi pencatatan hasil penyusunan DPS, misalnya jumlah KK per TPS, jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, dan jumlah pemilih yang Memenuhi Syarat.	Berdasarkan SE Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus dengan tetap berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat

TUGAS PENGAWASAN PENYUSUNAN DPS



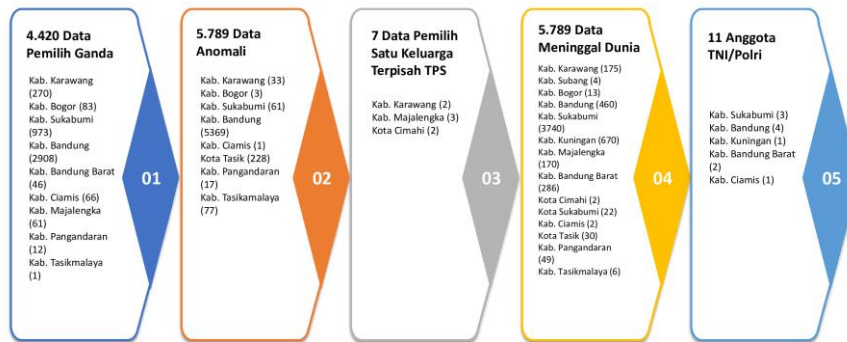
HASIL PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

- Terdapat 86 (delapan puluh enam) Kecamatan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan jumlah Pemilih dan jumlah TPS dalam Berita Acara Rekapitulasi DPS oleh PPK diluar mekanisme pleno terbuka dan juga tanpa melibatkan para pihak;
- Terdapat 375 Berita Acara rekapitulasi tingkat Kecamatan yang mengalami perbedaan jumlah data Pemilih dan TPS dengan data rekapitulasi Kabupaten/Kota;
- Terdapat selisih 62.900 Pemilih Aktif yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota;
- Terdapat selisih 301.831 Pemilih Baru yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota;
- Terdapat selisih 313.031 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota;
- Terdapat selisih 7.978 Perbaikan Data Pemilih yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota;
- Terdapat selisih 22.675 Pemilih Potensial Non-KTP el yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota;
- Terdapat data pemilih yang meninggal dunia namun belum dapat dilakukan pencoretan, karena belum adanya surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Terdapat 4 (empat) daerah terdampak pembangunan, yaitu: Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bandung yang berpotensi hak pilihnya tidak terfasilitasi.

Potensi Permasalahan Kampanye di Tempat Pendidikan (1)

- Tempat Pendidikan merupakan ruang yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid atau mahasiswa untuk belajar, dan juga bagi warga sekolah atau sivitas akademika.
- Untuk itu tempat Pendidikan harus dijaga kondusivitas dan netralitasnya.
- Jika tidak dijaga kondusivitas dan netralitas tersebut maka berpotensi terjadinya kerawanan dan pelanggaran hukum.

HASIL PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)



CATATAN HASIL PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DPT

Fokus Pengawasan:

1. Memastikan Hak Pilih Warga Negara Terlindungi;
2. Memastikan Daftar Pemilih telah disusun secara akurat, absah, aktual dan komprehensif
3. Memastikan Prosedur Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap berbagai persoalan tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Berdasarkan hasil Pengawasan, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah memberikan saran perbaikan/rekomendasi sebagai bentuk pencegahan dan telah ditindaklanjuti oleh kepada KPU sesuai tingkatannya

No.	Kabupaten/Kota	SARAN PERBAIKAN
1	Kabupaten Bogor	Sudah Ditindaklanjuti
2	Kabupaten Cianjur	Sudah Ditindaklanjuti
3	Kabupaten Bandung	Sudah Ditindaklanjuti
4	Kabupaten Garut	Sudah Ditindaklanjuti
5	Kabupaten Ciamis	Sudah Ditindaklanjuti
6	Kabupaten Cirebon	Sudah Ditindaklanjuti
7	Kabupaten Indramayu	Sudah Ditindaklanjuti
8	Bandung Barat	Sudah Ditindaklanjuti
9	Pangandaran	Sudah Ditindaklanjuti
10	Kota Sukabumi	Sudah Ditindaklanjuti
11	Kota Bandung	Sudah Ditindaklanjuti
12	Kota Cirebon	Sudah Ditindaklanjuti
13	Kota Cimahi	Sudah Ditindaklanjuti
14	Kota Tasikmalaya	Sudah Ditindaklanjuti
15	Kota Banjar	Sudah Ditindaklanjuti



PELAKSANAAN PENGAWASAN KAMPANYE OLEH BAWASLU PROVINSI

Pasal 4 ayat 2 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 ttg Pengawasan Kampanye Pemilu

- penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah provinsi;
- penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
- koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah provinsi;
- pengawasan secara langsung;
- analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
- penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
- pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	KAMPANYE PEMILU		
a.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
b.	Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
c.	Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
2	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
a.	Kampanye Pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
b.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024

Larangan Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi

- Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menegaskan larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Namun dalam bagian Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Adapun yang dimaksud tempat Pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.
- Putusan MK Nomor 65/PII-XXI/2023 yang dibacakan tanggal 15 Agustus 2023 telah meletakkan norma baru sehingga Pasal 280 ayat (1) selengkapnya berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye”.



Potensi Permasalahan Kampanye di Tempat Pendidikan (2)

- Terjadinya pembelahan institusi pendidikan ke dalam aliran kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan kampanye yang dapat mempengaruhi suasana pembelajaran.
- Terjadinya polarisasi warga satuan pendidikan atau civitas akademika, dan bagi Pegawai Negeri Sipil akan berbenturan dengan prinsip netralitas PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar ketentuan larangan keikutsertaan ASN dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 283 UU Pemilu.
- Terjadinya diskriminasi dan keberpihakan dalam pengaturan jadwal dengan banyaknya jumlah peserta Pemilu.



Aktifitas Pencegahan Menjelang Masa Kampanye

Imbauan 1: Larangan Kampanye pada Hari Buruh
Imbauan 2: Terkait Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi
Imbauan 3: Terkait Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang Melanggar
Imbauan 4: Terkait Kampanye diluar Jadwal
Surat Intruksi Penertiban APS Melanggar: Koordinasi dengan Stakeholder yang berwenang

Kolaborasi Pencegahan menjelang masa Kampanye

- MoU dengan Komisi Informasi
- Perjanjian Kerja Sama dengan POLDA JABAR
- Deklarasi Pemilu Damai Kaum Perempuan
- Deklarasi Pemilu Damai Kaum Disabilitas
- Deklarasi Pemilu Damai Kelompok Santri
- Deklarasi Pemilu Damai Saka Adhyasta Pemilu
- Koordinasi dengan Satpol PP Jawa Barat



Pembinaan Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilu

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota di setiap menjelang Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 dalam bentuk:

- Bimbingan Teknis;
- Penyediaan Wadah Konsultasi;
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- Fasilitasi

Strategi Pengawasan Partisipatif

Adapun beberapa strategi Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provisni Jawa Barat yaitu dengan beberapa program sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <p>01</p> <p>Pendidikan Pengawasan Partisipatif</p> <p>Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.</p> | <p>02</p> <p>Forum Warga Pengawasan Partisipatif</p> <p>Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang meruapkan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.</p> |
| <p>03</p> <p>Pojok Pengawasan</p> <p>Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.</p> | <p>04</p> <p>Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi</p> <p>Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.</p> |
| <p>05</p> <p>Kampung Pengawasan Partisipatif</p> <p>Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau kabupaten/kota di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.</p> | <p>06</p> <p>Komunitas Digital</p> <p>Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas masyarakat dengan membangun persilangan, menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri.</p> |

KERAWANAN KABUPATEN/KOTA DIMENSI PARTISIPASI

RAWAN TINGGI 2 Kab./Kota	RAWAN SEDANG 18 Kab./Kota	RAWAN SEDANG	RAWAN SEDANG 7 Kab./Kota
Kab. Majalengka 100	Kota Tasikmalaya 0.26	Kab. Subang 0	Kab. Karawang 0
Kab. Bandung 67.71	Kota Cirebon 0	Kab. Indramayu 0	Kab. Sukabumi 0
	Kab. Sumedang 0	Kab. Ciamis 0	Kota Depok 0
	Kota Bekasi 0	Kota Banjar 0	Kota Sukabumi 0
	Kab. Garut 0	Kab. Bandung Barat 0	Kota Cimahi 0
	Kab. Purwakarta 0	Kab. Tasikmalaya 0	Kota Bogor 0
	Kab. Cirebon 0	Kab. Kuningan 0	Kab. Cianjur 0
	Kab. Bogor 0	Kab. Pangandaran 0	
	Kota Bandung 0	Kab. Bekasi 0	

11

10 PROVINSI RAWAN TINGGI PER DIMENSI IKP

KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK	PENYELENGGARAAN PEMILU	KONTESTASI	PARTISIPASI
<ul style="list-style-type: none"> Maluku Utara (100) Sulawesi Utara (89,58) Papua (80,53) DKI Jakarta (78,27) Yogyakarta (75,87) Jawa Barat (74,91) Kalimantan Timur (72,70) Sumatera Utara (72,61) Papua Barat (72,33) Kalimantan Selatan (66,96) 	<ul style="list-style-type: none"> Kalimantan Timur (100) Sumatera Utara (94,29) DKI Jakarta (92,36) Jawa Tengah (91,67) Sulawesi Utara (91,60) Banten (89,43) Maluku Utara (86,48) Jawa Barat (83,38) Lampung (81,13) Sulawesi Tenggara (80,48) 	<ul style="list-style-type: none"> Maluku Utara (100) DKI Jakarta (96,09) Lampung (89,30) Jawa Barat (83,71) Bangka Belitung (79,10) Sulawesi Utara (73,96) Bali (71,32) Nusa Tenggara Timur (68,96) Gorontalo (65,65) Riau (62,96) 	<ul style="list-style-type: none"> Sulawesi Utara (100) DKI Jakarta (87,01) Yogyakarta (87,01) Kepulauan Riau (87,01) Sulawesi Tengah (87,01) Papua (64,72) Jawa Barat (62,07) Kalimantan Timur (30,92)

31

HASIL SCORING IKP KABUPATEN/KOTA PEMILU 2024

RAWAN TINGGI 9 Kab./Kota	RAWAN SEDANG 22 Kab./Kota	RAWAN SEDANG	RAWAN RENDAH 2 Kab./Kota
Kab. Bandung 91.5887	Kab. Karawang 46.2969	Kab. Subang 30.7301	Kota Depok 13.2152
Kab. Majalengka 67.1395	Kota Sukabumi 46.0925	Kota Cirebon 28.4517	Kota Bandung 11.9559
Kab. Tasikmalaya 65.4239	Kab. Bogor 45.8336	Kota Cimahi 26.1731	
Kab. Cirebon 64.7942	Kab. Garut 38.9472	Kota Bogor 21.5482	
Kab. Bandung Barat 59.9347	Kab. Ciamis 36.2260	Kab. Pangandaran 21.4091	
Kota Bekasi 55.4842	Kab. Sukabumi 32.6387	Kota Banjar 19.8318	
Kota Tasikmalaya 51.2801	Kab. Sumedang 31.6563	Kab. Purwakarta 18.6518	
Kab. Kuningan 51.0987	Kab. Indramayu 30.748	Kab. Bekasi 14.5544	
Kab. Cianjur 50.6529			

7

KERAWANAN KABUPATEN/KOTA DIMENSI SOSIAL POLITIK



KERAWANAN KABUPATEN/KOTA DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU



KERAWANAN KABUPATEN/KOTA DIMENSI KONTESTASI



NO	NAMA SATKER	JUMLAH KEK	JUMLAH DESKEL	JUMLAH TPS	SEGEL			
					TOTAL KEBUTUHAN	TOTAL KIRIM	SISA	PERSENTASE KIRIM
1	2	3	4	5	15	16	17	
1	KABUPATEN BOGOR	40	435	15.228	1.462.768	1.462.768	-	100,00 %
2	KABUPATEN SUKABUMI	47	386	8.000	768.908	768.908	-	100,00 %
3	KABUPATEN CIANJUR	32	360	7.278	735.790	699.405	36.385	95,05 %
4	KABUPATEN BANDUNG	31	280	11.034	1.059.890	1.059.890	-	100,00 %
5	KABUPATEN GARUT	42	442	8.000	788.909	788.909	-	100,00 %
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	39	351	5.096	490.011	490.011	-	100,00 %
7	KABUPATEN CIAMIS	27	265	3.943	379.095	379.095	-	100,00 %
8	KABUPATEN KUNINGAN	32	376	3.596	345.949	345.949	-	100,00 %
9	KABUPATEN CIREBON	40	424	6.938	666.917	666.917	-	100,00 %
10	KABUPATEN MAJALENGA	26	343	3.935	378.394	378.394	-	100,00 %
11	KABUPATEN SUMEDANG	26	277	3.657	351.640	351.640	-	100,00 %
12	KABUPATEN INDRAMAYU	31	317	5.316	510.999	510.999	-	100,00 %
13	KABUPATEN SUBANG	30	253	4.824	463.692	463.692	-	100,00 %
14	KABUPATEN PURWAKARTA	17	192	2.693	258.912	258.912	-	100,00 %
15	KABUPATEN KARAWANG	30	309	6.890	662.064	662.064	-	100,00 %
16	KABUPATEN BEKASI	23	187	8.417	809.477	809.477	-	100,00 %
17	KABUPATEN BANDUNG BARAT	16	165	5.088	488.794	488.794	-	100,00 %
18	KOTA BOGOR	6	68	2.913	279.787	279.787	-	100,00 %
19	KOTA SUKABUMI	7	33	999	101.009	96.019	4.990	95,06 %
20	KOTA BANDUNG	30	151	7.424	713.190	713.190	-	100,00 %
21	KOTA CIREBON	5	22	1.026	98.578	98.578	-	100,00 %
22	KOTA BEKASI	12	56	7.078	679.681	679.681	-	100,00 %
23	KOTA DEPOK	11	63	5.570	534.909	534.909	-	100,00 %
24	KOTA CIMAHI	3	15	1.560	149.813	149.813	-	100,00 %
25	KOTA TASIKMALAYA	10	69	1.997	191.896	191.896	-	100,00 %
26	KOTA BANJAR	4	25	611	58.730	58.730	-	100,00 %
27	KABUPATEN PANGANDARAN	10	93	1.346	129.424	129.424	-	100,00 %
TOTAL		627	5.957	140.457	13.538.236	13.496.861	41.375	99,69 %

**JENIS LOGISTIK
SEGEL**



ANTISIPASI KERAWANAN

- Membangun kerjasama dengan stakeholders kepemiluan terutama kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat terutama yang berbasis keagamaan dan kemasyarakatan.
- Mendorong komitmen dan pernyataan bersama dari peserta pemilu untuk tidak melakukan politisasi SARA dalam melakukan pendekatan dan meraih simpati pemilih.
- Mendorong peserta pemilu dan calon untuk menggunakan media sosial resmi dalam melakukan kampanye dan berkomunikasi dengan netizen. Penyusunan peraturan KPU dan Perbawaslu perlu lebih banyak memberikan penguatan terhadap media sosial sekaligus memberikan sanksi yang cepat dan efektif jika terdapat pelanggaran.
- Bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan media sosial dalam momentum politik diantaranya Kominfo dan POLRI
- Membangun kerjasama dengan semua pihak yang memiliki informasi dan data terkait dengan kelompok rentan dalam pemilu.
- Mengembangkan materi sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan akses bagi setiap kelompok rentan.



HASIL PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK TAHAP I

**JENIS LOGISTIK
KOTAK SUARA**

NO	NAMA SATKER	JUMLAH HEC	JUMLAH DES/KEK	JUMLAH TPS	KOTAK SUARA			PERSENTAS E KRIM
					TOTAL KEBUTUHAN	TOTAL KRIM	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	KABUPATEN BOGOR	40	435	15.228	76.220	76.220	-	100,00 %
2	KABUPATEN SUKABUMI	47	386	8.000	40.084	40.084	-	100,00 %
3	KABUPATEN CIANJUR	32	360	7.278	36.454	36.454	-	100,00 %
4	KABUPATEN BANDUNG	31	280	11.034	55.232	55.232	-	100,00 %
5	KABUPATEN GARUT	42	442	8.000	40.084	40.084	-	100,00 %
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	39	351	5.096	25.558	25.571	13	100,05 %
7	KABUPATEN CIMAIS	27	265	3.943	19.769	19.769	-	100,00 %
8	KABUPATEN KUNINGAN	32	376	3.596	18.044	18.044	-	100,00 %
9	KABUPATEN CIREBON	40	424	6.938	34.770	34.775	5	100,01 %
10	KABUPATEN MAJALENGA	26	343	3.935	18.727	18.727	-	100,00 %
11	KABUPATEN SUMEDANG	26	277	3.657	18.337	18.337	-	100,00 %
12	KABUPATEN INDRAMAYU	31	317	5.316	26.642	26.642	-	100,00 %
13	KABUPATEN SUBANG	30	253	4.824	24.183	24.185	5	100,02 %
14	KABUPATEN PURWAKARTA	17	192	2.693	13.499	13.499	-	100,00 %
15	KABUPATEN KARAWANG	30	309	6.890	34.510	34.510	-	100,00 %
16	KABUPATEN BEKASI	23	187	8.417	42.131	42.131	-	100,00 %
17	KABUPATEN BANDUNG BARAT	16	165	5.088	25.472	25.472	-	100,00 %
18	KOTA BOGOR	6	68	2.913	14.577	14.577	-	100,00 %
19	KOTA SUKABUMI	7	33	999	5.009	5.015	6	100,12 %
20	KOTA BANDUNG	30	151	7.424	37.180	37.180	-	100,00 %
21	KOTA CIREBON	5	22	1.026	5.130	5.140	10	100,19 %
22	KOTA BEKASI	12	56	7.078	35.414	35.414	-	100,00 %
23	KOTA DEPOK	11	63	5.570	27.872	27.872	-	100,00 %
24	KOTA CIMAH	3	15	1.560	7.806	7.806	-	100,00 %
25	KOTA TASIKMALAYA	10	69	1.997	10.005	10.005	-	100,00 %
26	KOTA BANJAR	4	25	611	3.063	3.098	35	101,14 %
27	KABUPATEN PANGANDARAN	10	93	1.346	6.750	6.750	-	100,00 %
TOTAL		627	5.957	140.457	703.529	703.603	74	100,01 %

**JENIS LOGISTIK
BILIK SUARA**

NO	NAMA SATKER	JUMLAH HEC	JUMLAH DES/KEK	JUMLAH TPS	BLK SUARA			PERSENTAS E KRIM
					TOTAL KEBUTUHAN	TOTAL KRIM	SISA	
1	2	3	4	5	9	10	11	
1	KABUPATEN BOGOR	40	435	15.228	60.912	60.852	60	99,90 %
2	KABUPATEN SUKABUMI	47	386	8.000	32.000	32.000	-	100,00 %
3	KABUPATEN CIANJUR	32	360	7.278	29.112	29.112	-	100,00 %
4	KABUPATEN BANDUNG	31	280	11.034	44.136	44.136	-	100,00 %
5	KABUPATEN GARUT	42	442	8.000	32.000	32.000	-	100,00 %
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	39	351	5.096	20.384	20.394	10	100,05 %
7	KABUPATEN CIMAIS	27	265	3.943	15.732	15.732	-	100,00 %
8	KABUPATEN KUNINGAN	32	376	3.596	14.384	14.384	-	100,00 %
9	KABUPATEN CIREBON	40	424	6.938	27.752	27.772	20	100,07 %
10	KABUPATEN MAJALENGA	26	343	3.935	15.740	15.740	-	100,00 %
11	KABUPATEN SUMEDANG	26	277	3.657	14.628	14.628	-	100,00 %
12	KABUPATEN INDRAMAYU	31	317	5.316	21.264	21.264	-	100,00 %
13	KABUPATEN SUBANG	30	253	4.824	19.296	19.306	10	100,05 %
14	KABUPATEN PURWAKARTA	17	192	2.693	10.772	10.772	-	100,00 %
15	KABUPATEN KARAWANG	30	309	6.890	27.560	27.560	-	100,00 %
16	KABUPATEN BEKASI	23	187	8.417	33.668	33.668	-	100,00 %
17	KABUPATEN BANDUNG BARAT	16	165	5.088	20.352	20.352	-	100,00 %
18	KOTA BOGOR	6	68	2.913	11.652	11.652	-	100,00 %
19	KOTA SUKABUMI	7	33	999	3.996	4.002	6	100,15 %
20	KOTA BANDUNG	30	151	7.424	29.696	29.696	-	100,00 %
21	KOTA CIREBON	5	22	1.026	4.104	4.114	10	100,24 %
22	KOTA BEKASI	12	56	7.078	28.312	28.312	-	100,00 %
23	KOTA DEPOK	11	63	5.570	22.280	22.280	-	100,00 %
24	KOTA CIMAH	3	15	1.560	6.240	6.240	-	100,00 %
25	KOTA TASIKMALAYA	10	69	1.997	7.988	7.988	-	100,00 %
26	KOTA BANJAR	4	25	611	2.444	2.464	20	100,82 %
27	KABUPATEN PANGANDARAN	10	93	1.346	5.384	5.384	-	100,00 %
TOTAL		627	5.957	140.457	561.828	561.854	26	100,00 %

**Status kendaraan operasional yang ada di Bawaslu
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut :**

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH KENDARAAN			
		PENGADAAN	PINJAM PAKAI	HIBAH	SEWA
1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	16	4	1	1
2	Bawaslu Kabupaten Bandung	-	-	2	3
3	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	-	-	-	7
4	Bawaslu Kabupaten Bekasi	-	-	-	7
5	Bawaslu Kabupaten Bogor	-	-	-	5
6	Bawaslu Kabupaten Ciamis	-	-	-	7
7	Bawaslu Kabupaten Cianjur	3	-	-	4
8	Bawaslu Kabupaten Cirebon	-	-	-	7
9	Bawaslu Kabupaten Garut	-	-	-	7
10	Bawaslu Kabupaten Indramayu	-	-	-	7
11	Bawaslu Kabupaten Karawang	-	-	-	7
12	Bawaslu Kabupaten Kuningan	-	-	-	6
13	Bawaslu Kabupaten Majalengka	-	-	-	6
14	Bawaslu Kabupaten Pangandaran	-	-	-	5
15	Bawaslu Kabupaten Purwakarta	-	-	-	6
16	Bawaslu Kabupaten Subang	-	-	-	6
17	Bawaslu Kabupaten Sukabumi	-	-	-	7
18	Bawaslu Kabupaten Sumedang	-	-	-	7
19	Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya	-	-	-	7
20	Bawaslu Kota Bandung	-	-	-	7
21	Bawaslu Kota Banjar	-	-	-	5
22	Bawaslu Kota Bekasi	-	-	-	2
23	Bawaslu Kota Bogor	-	-	-	2
24	Bawaslu Kota Cimahi	-	-	-	7
25	Bawaslu Kota Cirebon	-	6	-	4
26	Bawaslu Kota Depok	-	-	-	6
27	Bawaslu Kota Sukabumi	-	-	-	5
28	Bawaslu Kota Tasikmalaya	-	-	-	7

SECARA KESELURUHAN LOGISTIK TAHAP 1 DI JAWA BARAT SUDAH MENCAPAI

NO		
1	KOTAK SUARA	100 %
2	BILIK SUARA	100 %
3	TINTA	100 %
4	SEGEL	99,69 %

PERUSAHAAN & ALAMAT PERUSAHAAN LOGISTIK

LOGISTIK BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA DI 27 KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT DI PRODUKSI OLEH :

PT. CIPTA MULTI BUANA PERKASA
ALAMAT : PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK G NO. 10-16
KOSAMBI TIMUR, TANGERANG

No	Nama Kab Kota	Alamat Gudang	No	KABUPATEN SUBANG	GUDANG KPU KABUPATEN SUBANG, JL. PALABUAN NO. 8, SUKAMELANG, KEC. SUBANG, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT 41211	20	KABUPATEN PANGANDARAN	dusun Bantarkalong Sidomulyo RT 03 RW 10, desa Sidomulyo kecamatan Pangandaran,
1	KABUPATEN BOGOR	Kawasan Industri Cibinong Center Industrial Estate (CICIE), Kp. Pasir Tangkil RT 013/005, Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;	10	KABUPATEN SUBANG	GUDANG KPU KABUPATEN SUBANG, JL. PALABUAN NO. 8, SUKAMELANG, KEC. SUBANG, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT 41211	20	KABUPATEN PANGANDARAN	dusun Bantarkalong Sidomulyo RT 03 RW 10, desa Sidomulyo kecamatan Pangandaran,
2	KABUPATEN CIANJUR	Kawasan Pergudangan Jl. Raya Bandung KM.5 Desa Sukamulya Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur	11	KABUPATEN PURWAKARTA	Gudang Logistik KPU Kabupaten Purwakarta beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kp. Asem RT. 18 RW. 08 Kelurahan Purwamekar, Kabupaten Purwakarta.	21	KABUPATEN SUKABUMI	
3	KABUPATEN BANDUNG	Komplek Gudang Swallow Jl. Raya Kopo No.189 Desa PangaubaN Kecamatan, Kaltipang	12	KABUPATEN KARAWANG	Gudang KPU Kabupaten Karawang, Jalan SurotoKunto No 17 Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang 41371	22	KABUPATEN MAJALENGKA	
4	KABUPATEN GARUT	1. Gudang Tegalkurdi, 2. Gudang Guntur Kencana, 3. Gudang Cibodas	13	KABUPATEN BANDUNG BARAT	kpu bandung barat, gudang obngbin rt 05 rw 04 desa laksanamekar kec. padalarang, bandung barat	23	KABUPATEN SUMEDANG	
5	KABUPATEN TASIK	Jl. Raya Timur Rt.40 Blok Singapama, Badakpaeh Desa Cipakat Kecamatan Singapama Kab. Tasikmalaya	14	KOTA BOGOR	Jl. Sholeh Iskandar No. 5A, 5B, 5C Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor	24	KABUPATEN BEKASI	
6	KABUPATEN CIAMIS	Gudang KPU Kabupaten Ciamis Jl. Jenderal Sudirman No.43 Ciamis Kode Pos 46211	15	KOTA BANDUNG	Central Sumber Makmur, Jl. Kiara Condong No.441, Kb. Kiangkung, Kec. Karazondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40281	25	KOTA SUKABUMI	
7	KABUPATEN KUNINGAN	Gudang Eks Sicepat Jl. Raya Ciamis Imbanagara, Kabupaten Ciamis	16	KOTA CIREBON	Kantor KPU Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.260, Sekepa, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286	26	KOTA CIMAHI	
8	KABUPATEN CIREBON	Desa Cilowa RT16 RW 04 Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan	17	KOTA BEKASI	GUDANG BENTOEL, JALAN PRONGGOL NO.33, PEGAMBIRAN, KECAMATAN LEMAHWUNGKUK, KOTA CIREBON	27	KOTA BANJAR	
9	KABUPATEN INDRAMAYU	Gudang KPU Kab Cirebon PT, Yusmou Jl. Pangren Antasari Purbawinangun No 88	18	KOTA DEPOK	Gudang KPU Kota Bekasi, Padunman, Muksikaya dan PT. Alxindo, Jl. Alxindo RT 005 RW 016 Kal. Harapan Jaya, Kec. Bekasi			
		Gudang KPU Indramayu Jalan Pantura lugu Kecamatan Lohbener Indramayu Dan Jalan pantura jalan baru widasari Kecamatan Widasari Indramayu	19	KOTA TASIKMALAYA	(NASI Warehouse) Jl Raya Bogor KM 41,2 Cibinong, Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810			
					Jl Perintis Kemerdekaan Kersamenak Kawalu Kota Tasikmalaya			

REKAP GUDANG LOGISTIK 27 KAB/KOTA

KENDALA PENGAWASAN

1. JADWAL PENGIRIMAN LOGISTIK YANG TIDAK PASTI DARI KPU
2. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) KPU YANG BELUM MAKSIMAL
3. ALAT KERJA YANG BELUM MAMPU MEMOTRET SECARA KUANTITATIF
4. TERDAPAT GUDANG LOGISTIK DI KOTA DEPOK YANG LETAK GUDANGNYA DI KABUPATEN BOGOR (NAS WAREHOUSE) JL RAYA BOGOR KM 41,2 CIBINONG, PABUARAN, KEC. CIBINONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT 16810



Fasilitas/sarana prasarana dan personil Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Fasilitas kantor Bawaslu di Provinsi Jawa Barat untuk status penggunaannya ada 13 kantor status pinjam pakai dan 14 kantor sewa serta 1 kantor status penggunaan sementara dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SATUAN KERJA	STATUS GEDUNG BANGUNAN		
1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Pinjam Pakai	15	Bawaslu Kabupaten Purwakarta
2	Bawaslu Kabupaten Bandung	Pinjam Pakai	16	Bawaslu Kabupaten Subang
3	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Sewa	17	Bawaslu Kabupaten Sukabumi
4	Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pinjam Pakai	18	Bawaslu Kabupaten Sumedang
5	Bawaslu Kabupaten Bogor	Sewa	19	Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
6	Bawaslu Kabupaten Ciamis	Pinjam Pakai	20	Bawaslu Kota Bandung
7	Bawaslu Kabupaten Cianjur	Sewa	21	Bawaslu Kota Banjar
8	Bawaslu Kabupaten Cirebon	Sewa	22	Bawaslu Kota Bekasi
9	Bawaslu Kabupaten Garut	Sewa	23	Bawaslu Kota Bogor
10	Bawaslu Kabupaten Indramayu	Sewa	24	Bawaslu Kota Cimahi
11	Bawaslu Kabupaten Karawang	Sewa	25	Bawaslu Kota Cirebon
12	Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pinjam Pakai	26	Bawaslu Kota Depok
13	Bawaslu Kabupaten Majalengka	Pinjam Pakai	27	Bawaslu Kota Sukabumi
14	Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Sewa	28	Bawaslu Kota Tasikmalaya
				Penggunaan Sementara

Kondisi Personil

Untuk kondisi personil di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara umum masih menghadapi beberapa persoalan, salah satu yang paling utama adalah terkait pengisian jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV.

Kekosongan pejabat definitive Kepala Bagian di Bawaslu Provinsi dan Jabatan Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian di Bawaslu Kabupaten/Kota masih belum sepenuhnya terselesaikan sampai dengan bulan Desember 2023. Jabatan – jabatan struktural ini sangat dibutuhkan kewenangannya untuk mendorong optimalisasi proses bisnis yang sedang berjalan agar percepatan pelaksanaan program kerja baik yang bersifat tahapan maupun non tahapan sebagai perpanjangan tangan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Terkait dengan jumlah pegawai yang saat ini ada di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat rinciannya adalah 163 orang ASN, 298 orang PPNPNS Pelaksana Teknis dan 122 orang Tenaga Pendukung, sehingga total seluruh pegawai adalah 583 orang. Sementara untuk penugasan ASN dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu langkah penambahan personil untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 belum terlihat, sebab sampai saat ini yang terjadi hanyalah pergantian personil ASN dari Pemda yang sudah habis masa penugasannya ditarik kembali ke instansi dan kemudian di gantikan oleh ASN penugasan lainnya.

Untuk Jumlah Pengawas di tingkat Kecamatan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1881 Panwascam dan 5.957 Pengawas Desa/Kelurahan dan segera direkrut Pengawas TPS sebanyak 148.000 orang.

Jaminan Asuransi

Untuk jaminan asuransi, saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Total Pegawai yang mendapat jaminan asuransi tersebut sebanyak 554 orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI		15	21 orang	21 orang
		BPJS KESEHATAN	BPJS KETENAGAKERJAAN			
1	Bawaslu Provinsi Jawa Barat	44 orang	44 orang	16	22 orang	22 orang
2	Bawaslu Kabupaten Bandung	21 orang	21 orang	17	21 orang	21 orang
3	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	18 orang	18 orang	18	19 orang	19 orang
4	Bawaslu Kabupaten Bekasi	23 orang	23 orang	19	18 orang	18 orang
5	Bawaslu Kabupaten Bogor	15 orang	15 orang	20	17 orang	17 orang
6	Bawaslu Kabupaten Ciamis	21 orang	21 orang	21	16 orang	16 orang
7	Bawaslu Kabupaten Cianjur	21 orang	21 orang	22	17 orang	17 orang
8	Bawaslu Kabupaten Cirebon	22 orang	22 orang	23	17 orang	17 orang
9	Bawaslu Kabupaten Garut	22 orang	22 orang	24	16 orang	16 orang
10	Bawaslu Kabupaten Indramayu	19 orang	19 orang	25	17 orang	17 orang
11	Bawaslu Kabupaten Karawang	16 orang	16 orang	26	19 orang	19 orang
12	Bawaslu Kabupaten Kuningan	21 orang	21 orang	27	19 orang	19 orang
13	Bawaslu Kabupaten Majalengka	20 orang	20 orang	28	15 orang	15 orang
14	Bawaslu Kabupaten Pangandaran	17 orang	17 orang	TOTAL	554 orang	554 orang

Pendanaan Hibah NPHD-1

Terkait pendanaan hibah pemilihan serentak tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan Penandatanganan NPHD secara serentak pada tanggal 10 November 2023 di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.381-Kesbangpol/2023 tanggal 27 Juni 2023, tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dimana Usulan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memuat alokasi anggaran honorarium sebesar Rp 309.948.805.000 dengan rincian Honorarium Panwascam, PKD, PTPS, Pokja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memuat anggaran untuk iuran BPJS ketenagakerjaan dan belanja barang jasa operasional di tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 33.634.646.000.

Pendanaan Hibah NPHD-2

Atas susulan tersebut telah dilakukan pembahasan Bersama tim TAPD dan sementara Tim TAPD sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati alokasi anggaran untuk Basawlu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 305.222.813.000 dengan rincian pencairan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 122.089.125.200 atau 40% dari total alokasi anggaran dan tahun anggaran 2024 sebesar 183.133.687.800 atau 60%, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menandatangani NPHD dengan nomor 112/KU.17/Bakesbangpol dan 381/HK.02/K.JB/11/2023 pada tanggal 09 November 2023 berikut 24 Kab/Kota yg ada di Provinsi Jawa Barat, adapun untuk Bawaslu Kabupaten Garut NPHD ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Sumedang pada tanggal 20 November 2023 dan Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 21 November 2023

III. CATATAN DAN KESIMPULAN KUNJUNGAN KERJA DI MASA RESES KOMISI II DPR RI

1. Komisi II DPR mengingatkan kepada PJ Gubernur Jawa Barat untuk segera menyampaikan kepada 5 (lima) Kepala Daerah yang masih belum menuntaskan alokasi dan tanda tangan Hibah NPHD sebesar 40% diantaranya Kabupaten Sumedang, Kota Depok, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya.
2. Komisi II DPR mengimbau agar PJ Gubernur Jawa Barat menjalankan Surat Edaran Bersama Mendagri tentang pemberian Asuransi BPJS kepada semua penyelenggara Ad Hoc Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, selain itu juga hendaknya dapat menganggarkan untuk pengamanan Pemilu bagi Polri dan Satpol PP.
3. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU Jawa Barat agar melakukan Langkah Preventif terkait pengamanan Logistik Pemilu, dimana saat ini sampai dengan bulan Februari 2024 masih akan terjadi musim hujan dan potensi banjir sehingga akan berpengaruh

pada penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu, apabila Gudang tidak maksimal untuk dipindahkan.

4. Komisi II DPR mengingatkan KPU Jawa Barat agar Distribusi Logistik terutama Surat Suara Pemilu 2024 tepat waktu sampai di Gudang KPU Kabupaten/Kota serta terdistribusi ke TPS jangan sampai telat hingga TPS mau dibuka di tanggal 14 Februari. Distribusi surat suara Pemilu juga jangan sampai ada yang lalai dan salah dalam pengiriman, sehingga tidak tertukar daerahnya terutama pada Provinsi-Provinsi dan Kabupaten Kepulauan dan yang terluar dan jauh terpelosok.
5. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU Jawa Barat terkait dengan target partisipasi pemilih mencapai 82%, bukan sekedar mudah diucapkan dalam angka tetapi hendaknya KPU Jabar harus berkeja keras dan diperlukan terobosan dan langkah-langkah khusus dalam mengajak masyarakat untuk mencapai target tersebut.
6. Adanya pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran proses tahapan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di beberapa KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Komisi II DPR meminta agar KPU pada setiap tingkatan untuk mematuhi dan melaksanakan laporan Bawaslu sehingga semua proses berjalan secara lancar sesuai dengan peraturan yang ada.
7. Komisi II DPR berharap agar hendaknya Provinsi Jabar dapat menjadi *Role Model* dalam pelaksanaan suksesnya Pemilu tahun 2024, hal ini dikarenakan Provinsi Jabar Wilayahnya sangat luas dan Pemilinya DPT nya terbesar.
8. Komisi II DPR mengingatkan kembali kepada KPU Provinsi Jawa Barat agar permasalahan DPT harus bebas dan bersih dari permasalahan pemilih ganda, pemilih siluman, pemilih dimana penduduk yang belum kawin atau belum mencapai usia 17 tahun tetapi sudah terdaftar dalam DPT, juga bersih dari data pemilih yang alih profesi warga menjadi TNI POLRI.
9. Komisi II DPR mengingatkan terkait permasalahan pelanggaran Netralitas ASN termasuk Pj Gubernur Jabar dan Pj Kepala daerah Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara Pemilu 2024, hendaknya Bawaslu di setiap tingkatan jika mendapatkan temuan harus punya keberanian untuk menindak, sehingga jagan terkesan melakukan pembiaran dan terbang pilih dalam pelanggaran Netralitas ASN.
10. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU RI tentang permasalahan seleksi KPU Kabupaten Sukabumi dan KPU Kota Sukabumi yang hingga saat ini belum dilantik sementara Tahapan Pemilu sudah masuk pada Tahapan Krusial Kampanye dan pengadaan dan distribusi Logistik Pemilu 2024.

11. Komisi II DPR mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Bawaslu di setiap tingkatan untuk tidak menghalangi Ketua RT dan Ketua RW beserta perangkatnya dengan melarang terlibat kampanye, sementara melarang RT dan RW dalam kampanye tidak ada aturan mengatur tentang hal tersebut.
12. Terkait dengan simpang siurnya pelarangan pemberian uang transport dan uang makan dari Peserta Pemilu, hendaknya KPU dan Bawaslu dapat melakukan sosialisasi secara langsung terhadap Keputusan KPU yang melarang pemberian uang makan dan transport kepada masyarakat dalam bentuk uang. Dalam Perbawaslu tentang pengawasan kampanye juga memperbolehkan biaya makan dan transport peserta kampanye, sehingga Pengawasan Bawaslu tentang hal tersebut harus juga *clear* sampai ke Panwaslu.
13. Komisi II DPR mengingatkan agar Pemerintah Daerah memastikan Blangko e-KTP cukup tersedia dalam percetakan untuk pemilih yang telah terdaftar maupun pemilih tambahan, Temuan Komisi II saat berkunjung ke satu Kabupaten masih terjadi kekurangan blangko e-KTP mencapai 10 rb an blangko. Untuk itu Pemda hendaknya berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait ketersediaan blangko, karena jika permasalahan pada Anggaran, Komisi II DPR menjamin tidak ada permasalahan anggaran untuk pengadaan blangko e-KTP, dimungkinkan masalah distribusinya dan kuota setiap daerah yang diatur oleh pejabat Kemendagri.
14. Komisi II DPR mengharapkan agar Bawaslu dalam setiap tingkatan pada Tahapan Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara dan masa tenang Pemilu 2024, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran diutamakan melakukan tindakan yang preventif, sehingga tidak semua pelanggaran dijadikan temuan untuk diproses dan nyatanya temuan dan aduan tersebut juga tidak sampai pada proses tindak lanjut.
15. Komisi II DPR mengingatkan Permasalahan pelanggaran Netralitas, terutama terhadap POLRI, TNI dan ASN jangan menjadi permasalahan dan citra buruk pemerintah.
16. Komisi II DPR juga mengingatkan antisipasi pada hari pemungutan dan perhitungan suara terhadap keselamatan dari penyelenggara badan Ad Hoc Pemilu sehingga tragedi meninggal dunia tidak terjadi lagi seperti Pemilu 2019.
17. Komisi II mengingatkan agar KPU dan Bawaslu dalam menentukan personil Badan Ad Hoc juga memperhatikan Keterwakilan terhadap kuota Perempuan, yang bukan saja hanya formalitas tetapi pihak penyelenggara dapat menjalankan ketentuannya.
18. Komisi II DPR mengingatkan akan Potensi pelanggaran dan kecurangan Pemilu akan terjadi dimana-mana secara masif,

termasuk jual beli suara dan *money politic* yang sering terjadi di Pemilu, Pilpres dan Pilkada tanpa terhindarkan dan sulit tertangani oleh Pengawas Pemilu dan bahkan dari Pihak Kepolisian, dengan durasi waktu yang sedikit dan personal pengawas yang terbatas menjadi permasalahan tersendiri dan menjadi evaluasi terhadap legislasi yang ada mengatur tentang Pemilu dan Pilkada.

19. Bagi Komisi II DPR, parameter Pemilu harus berjalan dengan tepat waktu dan berjalan secara Luber, Jurdil, Aman dan Damai. Dengan melibatkan semua partisipasi kalangan masyarakat, ulama, tokoh, ormas dan anak bangsa dalam kesuksesan Pemilu yang terbesar di dunia.
20. Dengan terselenggaranya Pemilu 2024 secara sukses, aman, tertib dan damai, Komisi II DPR berharap agar pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang berkualitas dan dapat menerapkan janji-janji dan aspirasi kehidupan masyarakat dalam kemajuan bangsa dan negara.

Jakarta, 12 Desember 2023

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI**